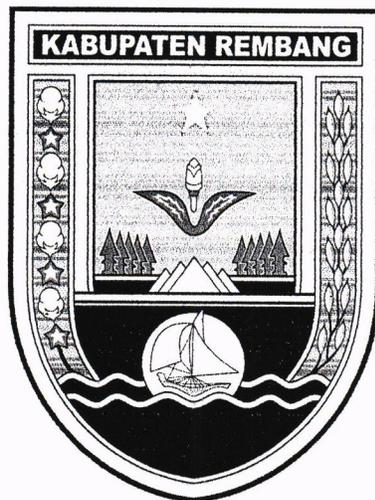


RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 24, 27 DAN 28 APRIL 2018



TENTANG

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

Hari : SELASA
Tanggal : 24 April 2018
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017;
 3. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 34 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 24 April 2018 kita dapat bertemu untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017, dengan agenda pokok Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

2017 perihal Penyampaian LKPJ Bupati Rembang, telah disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD Kabupaten Rembang. Hal tersebut telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan : LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan memperhatikan tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan yang berlaku, selanjutnya pada tanggal 7 April 2018 oleh DPRD melalui Badan Musyawarah bersama TAPD Kabupaten Rembang dilakukan penjadwalan terhadap pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017. Adapun rapat paripurna ini merupakan rapat paripurna yang pertama dari tiga rapat paripurna yang diagendakan dalam membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 34 orang.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa keabsahan pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan LKPD Bupati Akhir Tahun Anggaran ini, dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.

Dengan demikian, kuorum telah terpenuhi, dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan.

Untuk itu, dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 12.20 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum berlanjut ke acara pokok, terlebih dahulu akan saya

1. Pembukaan,
2. Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017;
3. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu : Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017.

Kepada Bupati Rembang, Saudara H. ABDUL HAFIDZ dipersilahkan.

====PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AKHIR TA 2017====

- *(Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 terlampir)*

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian telah kita ikuti penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 oleh Saudara Bupati Rembang. Selanjutnya, LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 ini akan dibahas oleh Komisi-Komisi DPRD sesuai bidang tugasnya, dan hasilnya berupa usul rekomendasi akan disampaikan dalam rapat paripurna internal DPRD pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018. Untuk penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 akan dilaksanakan pada rapat paripurna istimewa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018. Akhirnya, dengan mengucap “**Alhamdulillah**” tepat pukul 13.00 WIB , maka Rapat Paripurna DPRD hari ini ‘**alamin**“

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam memimpin rapat.

Sekian.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



K E T U A,

H. MAJID KAMIL MZ



SEKRETARIS, /

Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670421 199303 1 009

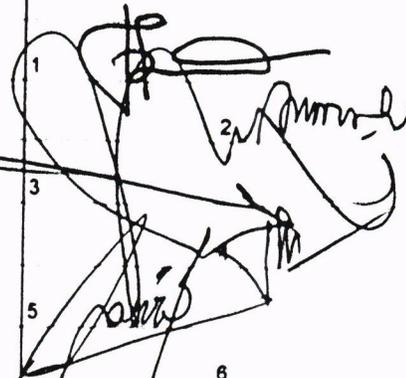
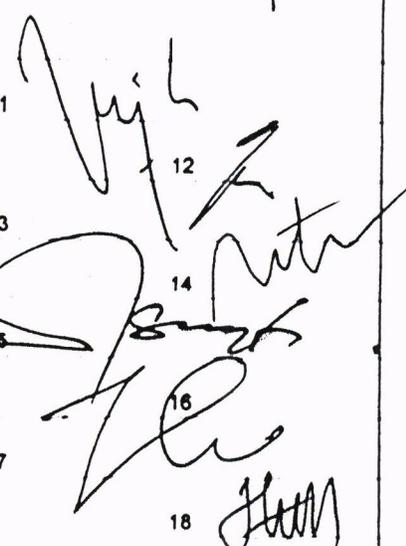
**LAMPIRAN :RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
Rembang Akhir Tahun Anggaran 2017.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 24 APRIL 2018
PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		-
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H.	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E.	Anggota		
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM		
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD
26	JASMANI	Anggota
27	WIDODO	Anggota
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota
31	FRIDA IRIANI	Anggota
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota
FRAKSI PARTAI GERINDRA		
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota
34	H. CHASANUDDIN	Anggota
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota
FRAKSI KARYA SEJAHTERA		
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota
FRAKSI HARAPAN		
42	SUKARMAIN	Anggota
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota
45	NUR JANNAH	Anggota

Keterangan :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Rembang

JUMLAH ANGGOTA 45 Orang
HADIR : Orang
TIDAK HADIR : Orang

Yaitu :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

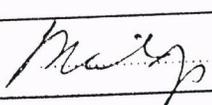
Rembang, 24 APRIL 2018
Petugas

NIP.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 H. MAJID KAMIL MZ ✓ | 23 MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi |
| 2 SUGIHARTO ✓ | 24 Drs. H. MUH. SUBAWOTO |
| 3 H.M. MURSYID, .ST ✓ | 25 SUMARSIH ✓ |
| 4 ZAIMUL UMAM NS | 26 JASMANI ✓ |
| 5 MOKHAMAD ZAENURI ✓ | 27 WIDODO |
| 6 SULISTYO WETI ARIANI | 28 ALI IRCHAM, S.T ✓ |
| 7 HENRY PURWOKO, S.Pd | 29 NANIK SRI SUNDARI ✓ |
| 8 MOHAMMAD ANSHORI ✓ | 30 DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M ✓ |
| 9 H. SUPADI ✓ | 31 FRIDA IRIANI ✓ |
| 10 NUR HASYIM ✓ | 32 M. BHAUD DUROR, Spi |
| 11 H. GUNASIH, S.E ✓ | 33 HERI KURNIAWAN, S.E |
| 12 EDI KARTONO, S.Pd, M.H | 34 H. CHASANUDDIN ✓ |
| 13 IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E | 35 PUJI SANTOSO, SP, M.H ✓ |
| 14 Hj. HIKMAH PURNAMAWATI ✓ | 36 H. YUDIANTO, S.H ✓ |
| 15 EKA SISWA KARTIKA ✓ | 37 AYU ARDIYAH MAYASARI ✓ |
| 16 H. ISLAHUDDIN | 38 H. I S M A R I, S.H. ✓ |
| 17 H. HARNO, S.E ✓ | 39 GATOT PAERAN, S.H. Msi ✓ |
| 18 MUGIYARTO, S.T ✓ | 40 H. JOKO SUPRIHADI, S.H ✓ |
| 19 M. BISRI CHOLIL LAQUF ✓ | 41 CATUR WINANTO, S.H |
| | 42 SUKARMAIN ✓ |

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**

HARI/TANGGAL : SELASA, 24 APRIL 2018
PUKUL : 11.00 WIB

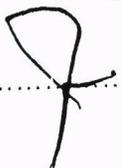
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	AGUNG BUDIANTO	6 
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	10
11	CAMAT SEDAN		11 
12	CAMAT SLUKE	12
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	MUTAHIN	14 

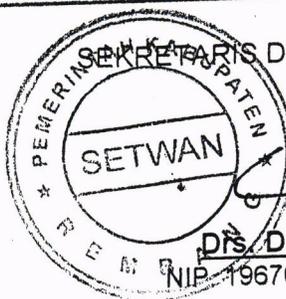
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

SETWAN
Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (1) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 24 APRIL 2018
 PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	<i>Dr. Utami Ram</i>	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5	<i>HARIYANTO</i>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	<i>K. Busi Ayu</i>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	<i>MAHZUMI</i>	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
3	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.

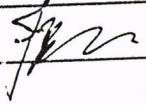
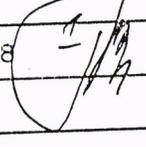
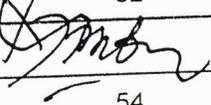


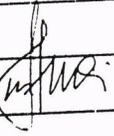
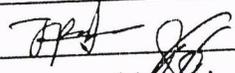
Drupodo
Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 24 APRIL 2018
PUKUL : 11.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			
2	STAF AHLI BUPATI			
3	STAF AHLI BUPATI			
4	STAF AHLI BUPATI	HARI S		
5	ASISTEN I SEKDA			
6	ASISTEN II SEKDA			
7	ASISTEN III SEKDA			
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	MASHADI	TAPEM	
9	BAG. HUKUM	Khohb	Hukum	
10	BAG. HUMAS			
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Latipudin	Kece	
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Moenik K	Kasubbag Kelembagaan	
15	BAG. UMUM			
16	BPPKAD	Miftahullohman	Kasubbag Program	
17	INSPEKTORAT			
18	BAPPEDA	SRI SURYANDARI	selektoris	
19	DINSOSP2KB	Dr Wahyuni	ku-	
20	B K D	Sup ARMIN	Ke Bler	
21	B P B D	Purnandi S.		
22	DPU TATA RUANG	SULFIHARDO	KADINAK	
23	DPKP/ DINPERKIM	ENDRO RIYADI	Seligin	
24	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utom		
25	DINDIKPORA	Ratih K	Fabid PAUD	
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			
27	DINTANPAN	Swanudin	Selektoris	
28	DINLUTKAN	BUDIYONO		
29				

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KARSONO.	Sekdin	33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	ADININGSIH.SH	Kasi Ketbang	35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Agus Rudi	WA	36 
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Sutarti K		38 
39	SATPOL PP			39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH	Pp. Sihombing.	Ca. Unit	42 
43	PD. BANK PASAR			43
44	PT. MIGAS REMBANG ENERGY	ZAENUL ARIFIN	DR	44 
45	BANK BNI 46			45
46	BANK JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	PD BPR BKK LASEM			48
49	PT. R B S J			49
50	APOTIK DAERAH			50
51	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	Litho illah	Kepala	51 
52	DIPENDA PROPINSI			52
53	BPS KAB. REMBANG	AMIRUDIN	Kepala BPS	53 
54	RUMAH TAHANAN			54
55	PERHUTANI KPH MANTINGAN			55
56	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			56
57	KANTOR PERHUTANI SPH IV			57
58	KANTOR POS DAN GIRO			58
59	TELKOM REMBANG			59
60	P _ N CAB. REMBANG			60
61	BAWASLU KAB. REMBANG			61
62	BPN KAB. REMBANG			62
63	KANTOR PAJAK			63
64	UP3AD (ASET DAERAH)			64
65	KANTOR PELABUHAN			65
				66

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
70	PERUM PEGADAIAN			70
71	BSM.BANK DANAMON			71
72	DHARMA WANITA PERSATUAN			72
73	GERAKAN PRAMUKA			73
74	FMI CAB. REMBANG			74
75	STIE. YPPI REMBANG			75
76	DPC PPP			76
77	DPC PARTAI DEMOKRAT			77
78	DPD PARTAI GOLKAR			78
79	DPD PAN			79
80	DPC PARTAI HANURA			80
81	DPC PKS			81
82	DPC PARTAI NASDEM	<i>Kusnadi + Khusni APD</i>		82 
83	DPC PARTAI GERINDRA			83
84	DPC PKB			84
85	DPC PDI PERJUANGAN			85
86	SUARA MERDEKA			86
87	CAKRA TV			87
88	RADIO CBFM	<i>Masudi</i>	<i>Reporter</i>	88 
89	RADIO R2B			89
90	MAJALAH BANGKIT			90
91	PATI EKSPRESS			91
92	RADIO MATA AIR			92
93	<i>DETIK KODIM</i>	<i>PENDI</i>	<i>BA'USAL</i>	93 
94	<i>DO</i>	<i>Reda</i>		94 
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 5,23 % yg dpt diartikan bahwa kondisi perekonomian di Kab. Rembang relatif stabil.
2. Angka inflasi dapat terkendali pada kisaran angka di bawah dua digit yaitu 0,56 % yg menunjukkan tingkat kestabilan harga barang & jasa.
3. Indeks gini rasio sebesar 0,30 yang berarti distribusi pendapatan masyarakat relatif merata & dapat dikategorikan sbg ketimpangan rendah
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 68,6 yg didukung oleh adanya peningkatan komponen-komponen penyusunnya seperti Angka harapan hidup (AHH) sebesar 74,27 dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 6,93.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



B. ASPEK PELAYANAN UMUM

- angka partisipasi murni pendidikan dasar yaitu SD/MI sebesar 86,47 SMP/MTs sebesar 74,21
- cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan sebesar 100 %
- cakupan desa imunisasi anak (UCI) mencapai 100%,
- cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin berupa kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 mencapai 100 %.
- proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 62,0 %
- proporsi daerah irigasi baik mencapai 81,0 %
- proporsi penduduk dengan akses air bersih 84,6%
- proporsi sanitasi baik 99,01%



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

- PDRB Kab. Rembang Atas dasar harga kontan 2010 telah mencapai nilai 11, 418 trilyun rupiah yang terdistribusi dalam 17 sektor lapangan usaha.
- Keberhasilan pembangunan sektor pertanian sebagai kontributor ekonomi terbesar yang dapat diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) tahun terakhir telah mencapai angka 99,73 yang mencerminkan indeks kemampuan petani untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan usaha taninya
- Kondisi daya saing daerah juga ditunjang iklim investasi yang semakin kondusif dengan perbaikan pelayanan perijinan usaha serta relatif terkendalinya gangguan keamanan sehingga mampu memberikan jaminan dan kepastian investasi di Kabupaten Rembang.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



D. ASPEK KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selama satu tahun terakhir situasi keamanan dan ketertiban masyarakat relatif kondusif sebagai cerminan karakter masyarakat Rembang yang penuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan.

Indikator keamanan dan ketertiban dapat dirasakan dari situasi dan kondisi wilayah yang tetap aman dan tenteram untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, keberlanjutan pembangunan serta kehidupan berdemokrasi yang damai. Hal ini dapat dilihat dari kondusifitas wilayah walaupun beberapa kali melakukan aksi demonstrasi terkait kebijakan nelayan cantrang, tidak terdapat aksi massa yang anarkis maupun gerakan-gerakan yang membahayakan negara di Kabupaten Rembang..



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

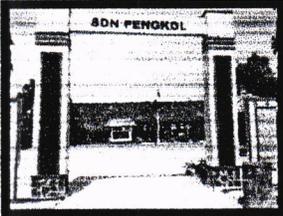
Selanjutnya, secara lebih utuh LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 ini akan Saya sampaikan gambaran ringkas penyelenggaraan pelaksanaan kewenangan urusan wajib



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PENDIDIKAN



- 1) Pendidikan Usia Dini (PAUD) : 86,78 %
- 2) Prosentase penduduk berusia > 15 tahun melek huruf : 83,42 %
- 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A : 86,47 %
- 4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B : 74,21 %
- 5) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI : 0,05 %



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



- 6) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs : 0,27 %
- 7) Angka Kelulusan (AL) SD/MI : 100 %
- 8) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs : 100 %
- 9) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs : 98,47 %
- 10) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA : 89,95 %
- 11) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV : 90,89 %



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017

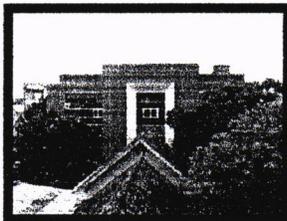


KESEHATAN

1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai sebesar 100% atau sudah terlayani;
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, capaian sebesar 100%;
3. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dengan capaian sebesar 100 %;
4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sudah mencapai 100 %;
5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, dengan capaian 47,3 %;
6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100 %;
7. Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin sebesar 101,10 %;
8. Cakupan kunjungan bayi sebesar 94,57 %.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



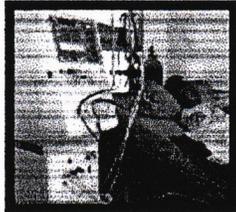
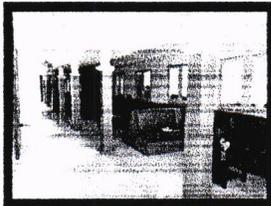
CAPAIAN KINERJA RSUD dr. R. SOETRASNO REMBANG

1. Angka keterlambatan pelayanan Pertama Gawat Darurat mencapai 0,09% atau hampir semua pasien tidak terlambat mendapatkan pelayanan pertama gawat darurat;
2. Angka Pasien dengan Dekubitus mencapai 0,09 %;
3. Angka Kejadian Infeksi dengan Jarum Infus mencapai 4,04 % (di bawah standar maksimal 7 %);
4. Angka Kematian Pasien Gawat Darurat mencapai 0,82 % (di bawah standar maksimal 1%);
5. Angka Masa Tunggu Sebelum Operasi Elektif (AMSOE) mencapai 0 %;



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017





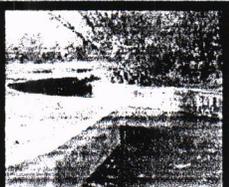
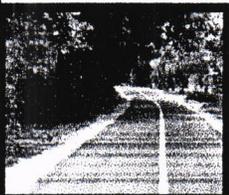
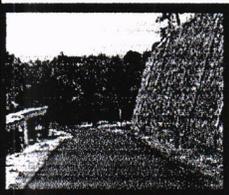
6. Infeksi Luka Operasi mencapai 2,19 %;
7. Angka Sectio Caesarea mencapai 33,57 %, sedangkan target maksimal 20%;
8. Angka Kematian Ibu Karena Perdarahan (AKIP) mencapai 0,15 %;
9. Angka Kematian Pasien Rawat Inap Intensif (ICU) mencapai 1,61 %;
10. Angka Kematian karena Eklamsia mencapai 0,15%.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Kondisi Jalan Kabupaten dan Irigasi Tahun 2017

- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 62 % atau sepanjang 398,5% km dari total jalan sepanjang 642,75 km.
- Proporsi luas jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 81% yakni seluas 17.167 km² dari total luas irigasi Kabupaten Rembang 21.193 km².

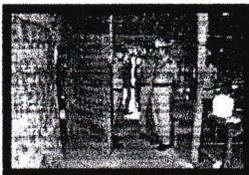


LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Proporsi rumah tangga pengguna air bersih sebesar 73,30 % atau sejumlah 141.386 rumah tangga dari jumlah total rumah tangga sejumlah 192.874;
2. Kawasan Kumuh perkotaan sebesar 0,29 % yaitu proporsi kawasan kumuh seluas 290,45 hektar dari total permukiman seluas 101.408,035 hektar;
3. Proporsi rumah layak huni mencapai 75,10 % atau sejumlah 132.558 unit dari jumlah seluruh rumah 176.505 unit.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Terselenggaranya pemeliharaan katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan bekerjasama instansi terkait serta melibatkan masyarakat;
2. Peningkatan dan pemberdayaan Linmas;
3. Penegakan Peraturan Daerah dengan pelaksanaan beberapa operasi;
4. Penanganan kejadian bencana meliputi banjir (30 desa 5 kecamatan). Gelombang pasang dan abrasi (1 desa-kelurahan 1 kecamatan), gerakan tanah longsor (29 desa 8 kecamatan), angin kencang (7 desa 4 kecamatan) dan kebakaran (15 desa-kelurahan 5 kecamatan).



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



SOSIAL

1. Jumlah sarana sosial sebanyak 13 buah (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi);
2. Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam 1 tahun adalah sebanyak 36 orang;
3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yaitu jumlah PMKS yang telah diberikan bantuan sebanyak 83 orang.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, secara lebih utuh LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 ini akan Saya sampaikan gambaran ringkas penyelenggaraan pelaksanaan kewenangan urusan wajib bukan pelayanan dasar

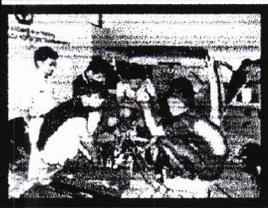


LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



TENAGA KERJA

1. Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh sebesar 36,19 % yaitu presentase jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif sebanyak 5.620 orang terhadap jumlah pekerja buruh sebanyak 15.529 orang.
2. Pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 16.84 % pekerja dari 1.704 pendaftar kerja.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 3.781 wanita meliputi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Angka melek huruf perempuan usia di atas 15 tahun mencapai 93,81 % atau 227.663 dari 242.686 perempuan di kelompok usia tersebut;
3. Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 66,97 % atau mencapai 80.084 dari total 119.583 angkatan kerja perempuan.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PANGAN

1. Terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Rembang Nomor 526/0138/2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang.
2. Ketersediaan pangan utama mencapai 60.914 kg per seribu penduduk per tahun.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PERTANAHAN

Kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang pertanahan diarahkan pada upaya fasilitasi penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang juga menjadi program pada bidang pertanahan. Kegiatan dari program dimaksud adalah fasilitasi penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan/konflik pertanahan.

Jumlah total dari luas tanah yang disertifikatkan di Kabupaten Rembang mencapai 6.652.606 m³ yang terdiri dari sertifikat hak milik seluas 6.562.485 m³, sertifikat HGB seluas 87.394 m³, sertifikat hak pakai seluas 2.727 m³. Dengan



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



LINGKUNGAN HIDUP

1. Penanganan sampah sebesar 0,02 % yaitu volume sampah yang ditangani sebesar 168 m³ dibandingkan dengan volume produksi sampah di Kabupaten Rembang sebesar 751.188 m³;
2. Kebersihan pasar berdasarkan rasio jumlah pasar tradisional tergolong baik yaitu sejumlah 26 pasar desa dengan capaian 100%;
3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per seribu penduduk mencapai 0,027% yaitu proporsi jumlah daya tampung TPS dari jumlah penduduk Kabupaten Rembang;
4. Penegakan hukum lingkungan mencapai 100% yaitu satu kasus yang diselesaikan pemda dari total 1 kasus lingkungan di Kabupaten Rembang;

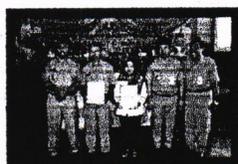


LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebesar 95 % dari jumlah penduduk wajib KTP,;
2. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk mencapai 83 %;
3. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah diterapkan di Kabupaten Rembang.



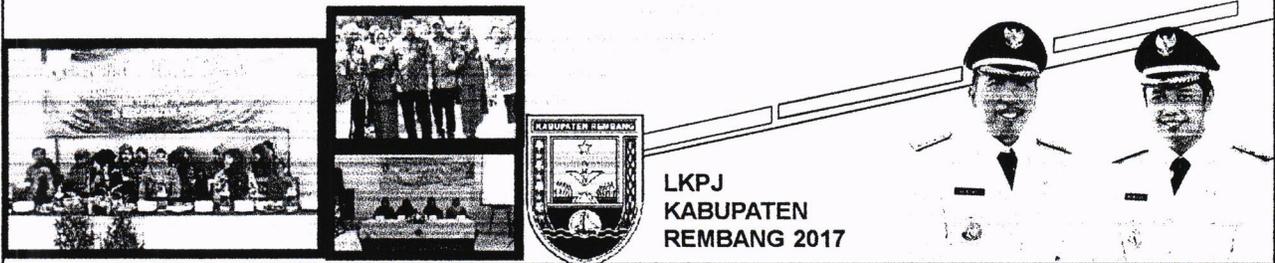
LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

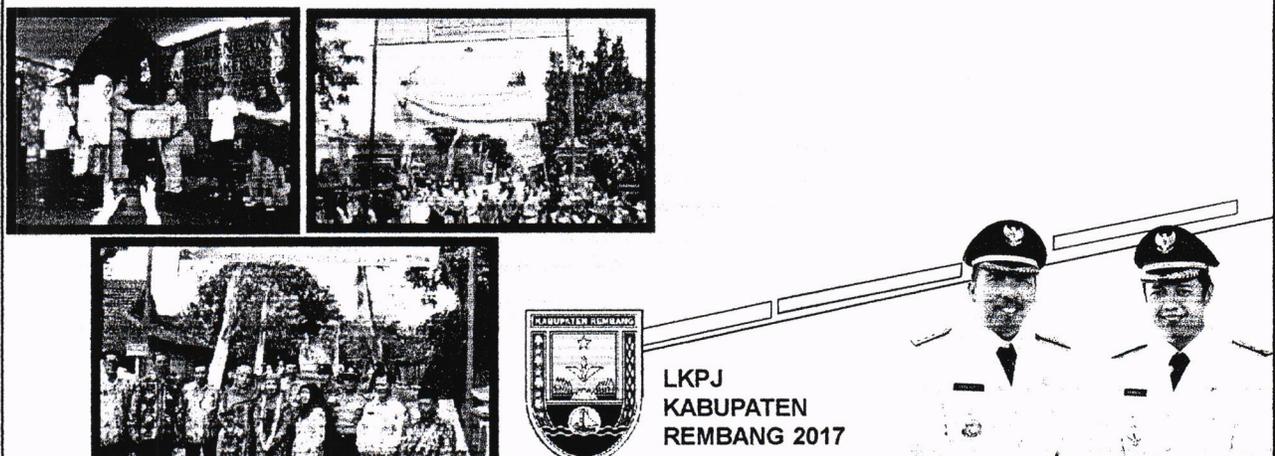
Penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada upaya pemantapan peran lembaga kemasyarakatan dan pengembangan partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif, serta peningkatan kegiatan usaha ekonomi masyarakat termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dimana pemerintahan desa diberikan kewenangan yang luas dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan lokal desa.

Pencapaian indikator kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2017 terlihat dari presentase PKK Aktif sebesar 100 % sejumlah 287 PKK, dan presentase Posyandu Aktif sebesar 100 % yaitu sebanyak 1.228 kelompok.



KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Prevalensi peserta KB aktif mencapai 84,11 % atau 115.959 dari jumlah 137.874 pasangan usia subur;
2. Rasio PLKB/PKB mencapai 17,69 % atau 52 PLKB melayani 294 desa/kelurahan.



PERHUBUNGAN

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang perhubungan tahun 2017 diantaranya dapat diketahui dari prosentase cakupan angkutan darat sebesar 0,18 % dengan proporsi jumlah angkutan darat sebanyak 1.140 unit dan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 647.471 orang

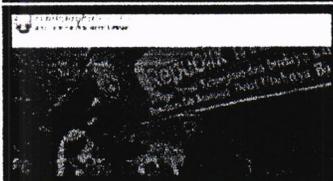


LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Terpeliharanya website milik pemerintah daerah (www.rembangkab.go.id) yang didukung oleh domain masing-masing OPD sehingga informasi publik dapat tersampaikan dengan media dimaksud;
2. Terselenggaranya Rembang Expo pada tanggal 29 Juli sampai dengan 5 Agustus 2017 bertempat di Balai Kartini Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 90 Rembang;
3. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Pemda yang tersedia berupa SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, Sim Perencanaan Penganggaran Terpadu, E-Sakip, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, E-Monev, Sistem Informasi Kearsipan Daerah, Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan, LPSE Kabupaten Rembang, JDIH Rembang, E-Retribusi Pasar, SIM Pendapatan Asli Daerah, SIM E-BPHTB.

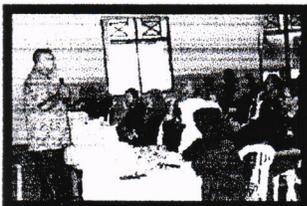


LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Capaian kinerja pembangunan bidang koperasi dan UKM pada tahun 2017 dapat diketahui melalui indikator Koperasi aktif mencapai 90 % dari jumlah koperasi sebanyak 315 unit dan Usaha Mikro dan Kecil sebesar 93,62 % dari jumlah seluruh UKM sebanyak 39.532 unit.

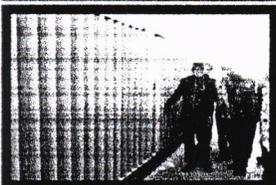


LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PENANAMAN MODAL

Capaian indikator kinerja bidang penanaman modal pada tahun 2017 dapat diketahui dari kenaikan nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 4,26 % yaitu mencapai Rp. 5.01 Triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 4,8 Triliun

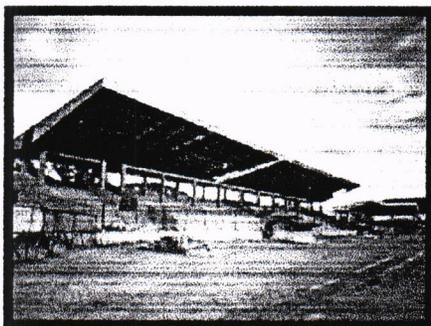


LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kepemudaan dan olah raga tahun 2017 dapat digambarkan dari ketersediaan sarana dan prasarana olahraga sebagai sebanyak 647 buah dengan rasio 1,03% dari jumlah penduduk di Kabupaten Rembang



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



STATISTIK

Capaian kinerja bidang statistik daerah dapat dilihat dari indikator tersedianya Buku Kabupaten Rembang Dalam Angka Tahun 2017, dan Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Rembang

PERSANDIAN

Capaian kinerja penyelenggaraan umum dan persandian tahun 2017 yaitu terlayannya kebutuhan penggunaan layanan informasi melalui jaringan telekomunikasi yang aman dalam pelaksanaan tugas kedinasan.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



KEBUDAYAAN

Capaian kinerja bidang kebudayaan pada tahun 2017, dapat diketahui dari penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya sebanyak 9 kali, sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 1 buah, serta presentase pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 79% (37 dari 47).



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PERPUSTAKAAN

1. Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 49,04 % dari jumlah koleksi buku yang tersedia sebanyak 34.497 buku.
2. Pengunjung perpustakaan sebesar 2,27% atau sebanyak 15.719 orang dalam setahun dari total jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani.

KEARSIPAN

Capaian Kinerja bidang Kearsipan Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dapat dilihat dari indikator prosentase penerapan pengelolaan arsip secara baku di lingkungan perangkat daerah yaitu sebesar 55,31 % atau sebanyak 26 perangkat daerah dan jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan sebanyak 39 kali.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, secara lebih utuh LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 ini akan Saya sampaikan gambaran ringkas penyelenggaraan pelaksanaan kewenangan urusan pilihan

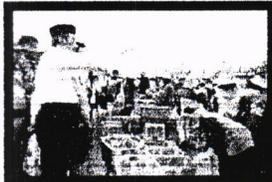


LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



KELAUTAN DAN PERIKANAN

Hasil pembangunan bidang kelautan dan perikanan tahun 2017 yaitu produksi perikanan laut sebesar 36.243,2 ton dengan nilai raman Rp. 410,8 miliar, produksi perikanan darat yang mencapai 6.337,04 ton serta usaha produktif keluarga nelayan yang mencapai 2.998 unit

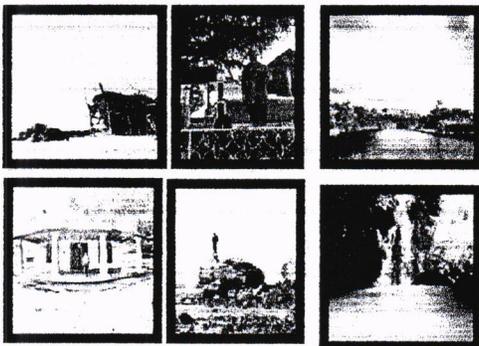


LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PARIWISATA

Pencapaian kinerja pembangunan bidang pariwisata tahun 2017 di Kabupaten Rembang yang terlihat dari jumlah total wisatawan per tahun mencapai 30.290.317 orang dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang mencapai 0,12 % terhadap total PDRB pada tahun 2017.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



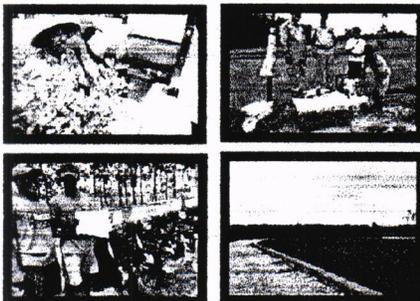
PERTANIAN

Dengan stimulasi pembiayaan tersebut, telah mendorong pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya :

• Padi Sawah	:	4,883	Ton/Ha
• Padi gogo	:	4,052	Ton /Ha
• Jagung	:	4,885	Ton /Ha
• Kedelai	:	1,400	Ton /Ha
• Aneka Cabai	:	37,989	Ton /Ha
• Bawang merah	:	0,006	Ton /Ha

2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 28,89 % dari jumlah total PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Rembang.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017

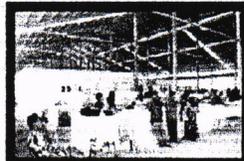


PERDAGANGAN

Capaian kinerja bidang perdagangan tahun 2017 dapat ditunjukkan melalui Kontribusi sektor sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rembang yang mencapai 13,50 % dengan nilai nominal sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan Ekspor Bersih Perdagangan sebesar Rp. 658.137.335.000.

PERINDUSTRIAN

Capaian kinerja bidang industri berupa kontribusi sektor Industri terhadap PDRB sebesar 21,80 % dan pertumbuhan industri tahun 2017 sebanyak 7,86 % atau sejumlah 181.375 dari total industri di Kabupaten Rembang.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



TRANSMIGRASI

Pada hakekatnya bidang ketransmigrasian merupakan upaya untuk pemerataan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Kebijakan bidang transmigrasi diarahkan sebagai upaya meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Fasilitasi Pengiriman Transmigrasi Keluar Pulau Jawa, Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Fasilitasi Rekrutirng Calon Peserta Transmigrasi.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

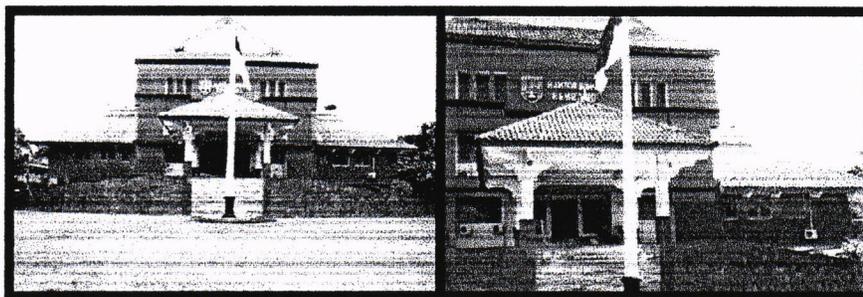
Selanjutnya, secara lebih utuh LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 ini akan Saya sampaikan gambaran ringkas penyelenggaraan pelaksanaan fungsi penunjang.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



SEKRETARIAT DAERAH



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



FASILITASI HUKUM

Sejumlah produk hukum yang tersusun sesuai kaidah-kaidah *legal drafting* di tahun 2017 meliputi 8 Peraturan Daerah, 51 Peraturan Bupati, dan 1.724 Keputusan Bupati.

ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAERAH

Capaian kinerja administrasi perekonomian daerah pada tahun 2017 terlihat pada distribusi beras miskin (raskin) di Kabupaten Rembang sebanyak 12.582,72 ton beras dengan jumlah penerima sebanyak 69.904 RTSM serta penyertaan modal sebesar 7,1 Miliar Rupiah ke beberapa Bank dengan penerimaan deviden sebesar Rp. 4.826.660.609.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PEMERINTAHAN UMUM

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum pada tahun 2017 diantaranya adalah :

1. Terpenuhinya kewajiban pemerintah daerah melaporkan kinerja kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat;
2. Terjalinya kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten sekitar dan Kerjasama Kawasan RATUBANGNEGORO.

PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah tahun 2017 diantaranya adalah berupa Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM-nya, serta penyusunan regulasi dan kebijakan terkait dengan perangkat daerah dan tata laksana di Kabupaten Rembang.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



UMUM DAN KEUANGAN

Capaian kinerja penyelenggaraan umum dan keuangan tahun 2017 yaitu terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran dan keuangan, terpenuhinya kebutuhan dinas, gedung dan kantor, terpeliharanya sarana dan prasarana, terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan terpeliharanya rumah dinas dan peralatan kantor maupun rumah tangga

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Capaian kinerja tahun 2017 yaitu terfasilitasinya kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, tersalurkankannya bantuan sosial dan penguatan dalam bidang keagamaan.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



HUBUNGAN MASYARAKAT

Capaian kinerja pada tahun 2017 meliputi tersedianya informasi dan penyebarluasan informasi melalui beberapa media seperti Majalah Bangkit serta media sosial Pemerintah Kabupaten Rembang.

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Terselenggaranya pengendalian pembangunan berupa monitoring dan evaluasi sehingga pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan harapan;
2. Terlaksananya fasilitasi pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017

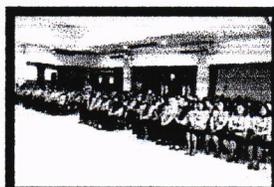
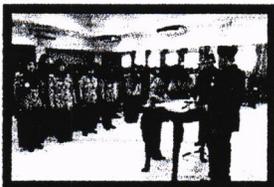


KEPEGAWAIAN DAERAH

Capaian kinerja penyelenggaraan bidang Kepegawaian pada tahun 2017

meliputi :

1. Rasio PNS sebesar 1,12% dari total penduduk ;
2. Berjalannya SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai).



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



SEKRETARIAT DPRD

Arah Kebijakan Umum Fasilitasi DPRD pada tahun 2017 diarahkan pada: 1) Penguatan peran Sekretariat DPRD dalam fasilitasi persidangan guna mendukung terwujudnya persidangan DPRD Kabupaten Rembang yang demokratis, aspiratif, transparan dan akuntabel; serta 3) Penguatan peran Sekretariat DPRD dalam fasilitasi pengkajian hukum dan perundang-undangan guna mendukung terwujudnya produk-produk hukum DPRD Kabupaten Rembang yang aspiratif, legal, implementatif dan berkeadilan.

Capaian kinerja Fasilitasi DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2017 meliputi disetujuinya 8 Raperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dan terselenggaranya fungsi DPRD dengan baik di Kabupaten Rembang.

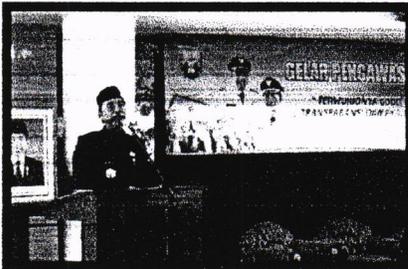


LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PENGAWASAN

Capaian kinerja pengawasan daerah pada tahun 2017 yaitu Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sebesar 71,61% atau sebanyak 459 dari total 641 rekomendasi.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



KEUANGAN DAERAH

Capaian kinerja penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset daerah tahun 2017 dapat diketahui dari indikator-indikator :

1. Belanja untuk pelayanan dasar mencapai 60,53% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2017;
2. Belanja untuk urusan pendidikan sebesar 30,30% dan kesehatan mencapai 15,29 % dari total realisasi belanja APBD Tahun 2017;
3. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu berdasarkan nota pengiriman dokumen tertanggal 30 Mei 2017;
4. Terdapat kenaikan PAD dari tahun 2016 sebesar 234,1 Miliar menjadi Rp. 316,9 Miliar pada tahun 2017 atau sebesar 35,36%.



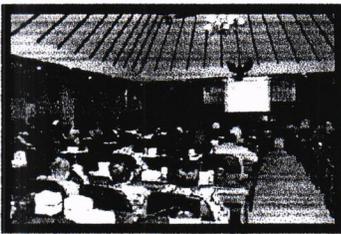
LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang perencanaan dapat dilihat dari ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Rembang meliputi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, sedangkan untuk perencanaan pembangunan pada tahun 2017 meliputi :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018.
2. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2017 yang mencapai 117,02 % yaitu jumlah program RKPD sebanyak 275 buah dan jumlah program RPJMD sebanyak 235 buah.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



PENUNJANG PEMERINTAH KECAMATAN

Penunjang pemerintah kecamatan digulirkan untuk memenuhi kebutuhan 14 Kecamatan di Kabupaten Rembang dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan maupun fasilitasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan di desa. Dana APBD untuk 14 kecamatan yang dialokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 44,3 Miliar dengan realisasi keuangan Rp. 42,3 Miliar atau sebesar 95,58 %.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



Dengan segenap pencapaian serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, Kita patut berbangga dg berbagai bentuk apresiasi berupa sejumlah penghargaan yg diterima Pemkab Rembang pada tahun 2017 diantaranya :

- Penghargaan Parahita Ekapraya kategori mentor;
- Penghargaan kategori madya Kabupaten Layak Anak;
- Penghargaan pasar tertib ukur ;
- Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional;
- Juara pertama kompetensi siswa tingkat nasional;



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



- Penghargaan koprası penggerak pembangunan kategori simpan pinjam dengan pengelolaan professional;
- Penghargaan juara pertama Tilawatil Qur'an Kategori Tahfidz 20 Juz;
- Penghargaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna terbaik pertama nasional;
- Penghargaan kabupaten pro investasi.



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017



Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2017 yang dapat kami sampaikan, Akhirnya kepada saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan yang telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh...



LKPJ
KABUPATEN
REMBANG 2017





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI OLEH KOMISI- KOMISI DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

Hari : JUM'AT
Tanggal : 27 April 2017
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi- Komisi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017;
 3. Persetujuan terhadap Usul Rekomendasi oleh Komisi- Komisi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017;
 4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: - orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 27 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Sebagai insan yang bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran-Nya, karena atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Jum'at tanggal 27 April 2018 kita dapat berkumpul untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 dengan agenda pokok Penyampaian Usul Rekomendasi Komisi-komisi dan persetujuan terhadap usul rekomendasi.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna hari ini adalah sebanyak 27 orang.

Adapun keabsahan kuorum pada Rapat Paripurna ini adalah sama dengan yang berlaku dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 kemarin, yakni dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir. Dengan

Dengan mengucapkan “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 10.30 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Sesuai kesepakatan Rapat Pimpinan Gabungan dan rapat Badan Musyawarah pada hari Selasa tanggal 2 April 2018, bahwa LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 dalam pembahasannya dilakukan oleh masing-masing komisi. Hasil dari pembahasan komisi-komisi, nantinya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Adapun sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 7 April 2018, bahwa pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 oleh komisi-komisi dilaksanakan kemarin pada tanggal 25 dan 26 April 2018.

Untuk selanjutnya akan saya sampaikan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-Komisi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017;
3. Persetujuan Terhadap Usul Rekomendasi Komisi-Komisi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017;
4. Penutup.

Rapat Dewan yang saya hormati

Berdasarkan kesepakatan rapat pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi-Komisi membahas laporan hasil pembahasan komisi terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun 2017 pada tanggal 26 April 2018, bahwa penyampaian laporan hasil pembahasan digabung menjadi satu, tidak satu persatu komisi sebagaimana yang telah diagendakan. Adapun yang ditunjuk untuk membacakan laporan adalah Saudara Puji Santoso, SP., M.H dari Komisi C.

Untuk itu kepada Saudara Puji Santoso, SP., MH dipersilahkan.

===== PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI =====

- *(Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-Komisi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 terlampir)*

Terima kasih Saudara Puji Santoso, SP., MH atas penyampiannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Demikian baru saja disampaikan usul rekomendasi dari komisi atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017. Sebelum usul rekomendasi ini nantinya ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagai Rekomendasi DPRD, maka perlu persetujuan dari rekan – rekan yang hadir dalam Rapat Paripurna ini.

- Interupsi Sdr H. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)
“ Tadi saya belum mendengar tentang rekomendasi tentang tidak tercapainya PAD pada sektor perikanan, itu kalau gak salah kurang sekitar 800 sekian juta, kebetulan kemarin dalam rapat pimpinan DPRD dan pimpian komisi yang mewakili pak sekretaris yang pada waktu rapat tidak ikut sehingga ini perlu saya sampaikan, tidak tercapainya itu kan karena

penting karena terkait dengan PAD kita yaitu perlu adanya penegakan perda terkait penjualan ikan diluar TPI, itu perlu ada catatan seperti itu sehingga ada perhatian khusus terhadap PAD yang tidak terpenuhi. Saya kira itu Pimpinan. Terima Kasih “

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Terima kasih saya coba konfirmasi sama Komisi B ya..sama sekretarisnya Sdr. Ali Ircham , S.T. Oke silahkan Pak Ali mewakili Komisi B, apakah benar kemarin ada rekomendasi seperti tadi terkait adanya kekurangan tercapainya PAD dari perikanan???, Silahkan Mas Ali”

➤ Sdr Ali Ircham, S.T(Fraksi PDI Perjuangan Nasdem)

“ Terima Kasih Pimpinan. Memang pada waktu pembahasan dengan perikanan saya ijin telat, sehingga apa yang dimaksudkan oleh Pak Joko terkait adanya kebocoran PAD dari sektor perikanan dan pada saat penyampaian / penyimpulan hasil rekomendasi saya tidak dikasih tahu, sehingga apa yang kami rekomendasikan saat itu sebagaimana apa yang saya tulis saat laporan. Ini solusinya sebelum rekomendasi ini disetujui maka Komisi B ada tambahan rekomendasi pada Dinlutkan terkait kebocoran PAD. Saya kira seperti itu pimpinan . Terima Kasih.”

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ terima kasih sebelum ini disetujui semua ini saya tawarkan terlebih dahulu tambahan rekomendasi Komisi B yang disusulkan Pak Joko setuju dimasukkan yaa??? “

➤ Setujuuu..... (Semua anggota DPRD Yang Hadir)

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Lha ini redaksinya sekarang atau menyusul ???? “

➤ Menyusul.....(Semua anggota DPRD Yang Hadir)

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara:

” Apakah dari Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== *Setujuuu ...!!!* =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Agenda pokok dalam rapat paripurna hari ini telah kita lalui, maka selesai sudah Rapat Paripurna hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucap *“Alhamdulillahirobbil ‘alamin “* tepat pukul 10.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



Handwritten signature of the Chairman in black ink, positioned over a purple circular official stamp of the DPRD Kabupaten Rembang.

SEKRETARIS,



Handwritten signature of the Secretary in black ink, positioned over a purple circular official stamp of the DPRD Kabupaten Rembang.

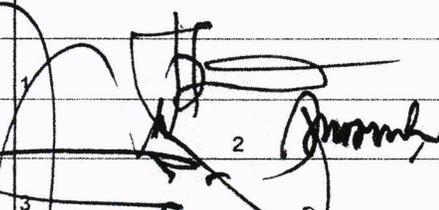
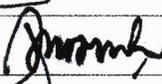
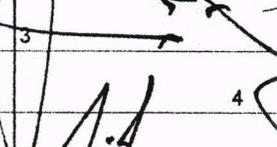
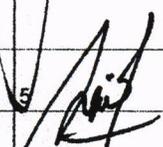
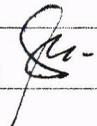
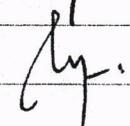
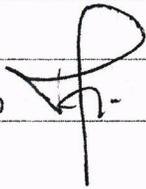
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN
USUL REKOMENDASI OLEH KOMISI- KOMISI
DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2017**

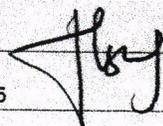
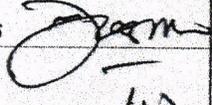
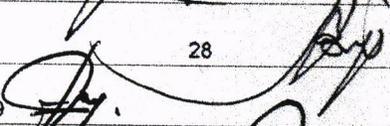
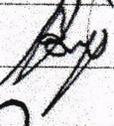
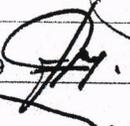
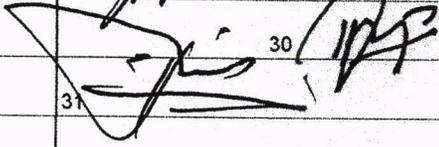
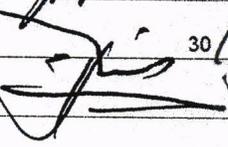
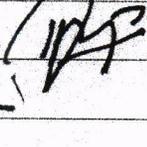
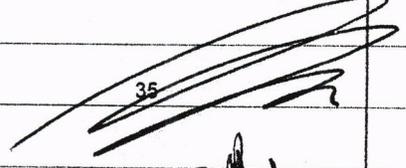
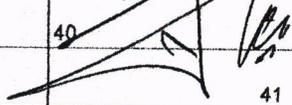
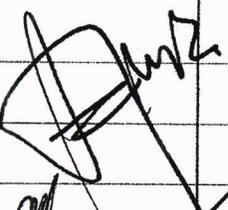
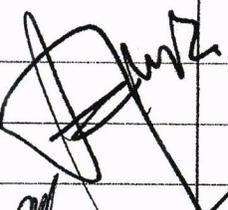
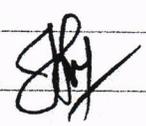
LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;

LAMPIRAN II : Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-
Komisi DPRD Atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Akhir
Tahun Anggaran 2017 ;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (II) INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG USUL REKOMENDASI KOMISI - KOMISI ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 27 APRIL 2018
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		.
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		.
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd. ,M.H.	Anggota		12
13	IMRO' ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota		13
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		14
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		15
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		16
17	H. HARNO, S.E.	Anggota		17
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota		18
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		.
20	MOHAMMAD IMBON	Anggota		

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA/A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
TINGKAT KOMISIDPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang serta Sekretaris DPRD beserta jajarannya.

Mengawali penyampaian laporan hasil pembahasan di tingkat Komisi DPRD Kabupaten Rembang, guna menyusun Rekomendasi atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang dengan baik. Semoga Tuhan selalu meridhoi setiap upaya kita semua. Aamiin.

Tahun anggaran 2017 merupakan tahun ke 2 (dua) dari periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, tahun dimana telah selesainya konsolidasi politik pasca pilkada 2015, menuju tahun pementapan program dan kegiatan. Sebagai tahun kedua RPJMD, maka LKPJ tahun 2017 merupakan tahun pertanggungjawaban yang penting dan strategis bagi pemerintahan baru, karena merupakan tahun evaluasi kinerja tahapan awal perencanaan lima tahunan, artinya dari data dan informasi capaian yang ada dalam dokumen LKPJ tersebut akan dapat diketahui apakah pemerintah daerah Kabupaten Rembang sampai dengan tahun kedua ada pada track yang benar atau menyimpang dari perencanaan lima tahunan (RPJMD) tersebut .

DPRD Kabupaten Rembang dalam proses pembahasan LKPJ tahun 2017, berusaha untuk tidak kehilangan momen strategis ini, dengan cara meningkatkan kualitas pembahasan untuk perubahan kebijakan pembangunan yang lebih baik dibanding periode yang lalu.

Berikut kami sampaikan hasil pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 di tingkat komisi sebagai berikut:

- I. Pelaksanaan :
 - a. Dasar : Surat tanggal 29 Maret 2018, nomor: 130.04/0761/2018, perihal penyampain LKPJ Bupati Rembang..
Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tentang penjadwalan pembahasan LKPJ tanggal 7 April 2018

II. HasilRapat:

Hasil rekapitulasi Laporan Hasil Pembahasan Tingkat Komisi DPRD Kabupaten Rembang selengkapnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. DPRD Kabupaten Rembang memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Eksekutif atas tersusunnya buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2017. Namun demikian dokumen LKPJ yang disajikan kurang lengkap karena tidak disertai dengan data dan informasi yang memadai terkait target rencana dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan capaiannya, sehingga tidak bisa dilihat tingkat keberhasilannya, dengan demikian kualitas LKPJ ini dirasakan kurang memuaskan dan sulit dipahami, dimana belum menggambarkan capaian Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran pembangunan daerah. Kondisi ini sangat krusial bagi penilaian kemajuan (progress) target capaian, mengingat Kabupaten Rembang mempunyai target yang cukup tinggi dalam pengentasan kemiskinan, pengangguran, kesejangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus dicapai hingga akhir periode RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021. Hal ini hendaknya menjadi momentum kesadaran kolektif bagi semua pihak agar lebih meningkatkan kompetensi, koordinasi dan kerjasama dalam fungsi pengendalian, evaluasi serta pengelolaan data statistik di Kabupaten Rembang. Oleh karenanya, DPRD merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Rembang kedepan perlu dibentuk tim OPD yang lebih kuat, solid dan memahami filosofi sesungguhnya dari tupoksi OPD yang dipimpinnya dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021.
2. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2017, kinerja pendapatan patut diapresiasi karena memencapai telah mencapai pertumbuhan tertinggi , dimana realisasi tahun 2017 pendapatan daerah dapat tumbuh 16,7%. Demikian juga dengan PAD walaupun beberapa jenis pendapatan tidak memenuhi target akan tetapi PAD secara agregat pertumbuhannya meningkat dibanding tahun sebelumnya, PAD tahun 2017 tumbuh 45,5% sangat progresif. Untuk itu DPRD merekomendasikan agar bidang pendapatan harus mendapat insentif yang memadai dan kedepan harus ada satu formulasi dan model pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih efektif dan produktif, sehingga apa yang ditargetkan dalam perencanaan dapat

demikian kinerja belanja masih diperlukan kerja keras agar serapan anggaran lebih baik lagi agar peningkatan tingkat serapannya lebih progresif yaitu paling tidak > 95% dari alokasi. Pada tahun 2017 Struktur belanja langsung masih konsisten cukup produktif, bahwa selama dua tahun terakhir belanja modal alokasi dan realisasinya lebih besar dibanding jenis belanja barang jasa dan belanja pegawai (honorarium dan upah), Untuk itu disarankan agar, kebijakan belanja langsung yang cukup produktif tersebut supaya terus dipertahankan, sampai kebutuhan infrastruktur dasar publik Kabupaten Rembang cukup, memadai dan standar.

3. Sebagian besar data capaian indikator kinerja terkait penyelenggaraan urusan desentralisasi juga belum dapat disajikan dan masih terdapat ketidaksamaan data capaian kinerja di tiap- tiap OPD yang disinyalir disebabkan kurangnya sinkronisasi antara OPD dan Tim penyusun LKPJ. Oleh karena itu DPRD merekomendasikan agar dalam penyusunan LKPJ Bupati dipersiapkan secara matang sehingga tidak ada kekurangan data yang disajikan.
4. Dokumen LKPJ Tahun 2017 dipandang belum memenuhi pedoman yang mencerminkan upaya pencapaian target RPJMD guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Hal ini terbukti pada sector pariwisata dan pemberdayaan masyarakat yang belum didukung oleh anggaran secara maksimal.
5. Terkait dengan program pemberdayaan masyarakat agar pemerintah daerah tidak hanya focus dalam pembangunan infrastruktur saja, pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui pelatihan-pelatihan sehingga dapat bersaing dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini.
6. Untuk meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang, dimohon agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata melakukan inovasi dan kreatifitas dalam mengalidestinasidestinasibaru di sektor pariwisata tidak hanya focus pada obyek- obyek wisata yang selama ini sudah ada dan sudah dikelola oleh masyarakat.

8. DPRD Kabupaten Rembang menerima LKPJ Bupati Tahun 2017 dengan merekomendasikan agar dokumen LKPJ kedepan dibuat lebih lengkap, sempurna dan memenuhi ketentuan persyaratan yang dibutuhkan sehingga dalam pembahasan DPRD mudah dipahami.

Demikian hasil pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2017, semoga dapat menjadi bahan rekomendasi Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

PUJI SANTOSO, SP, M. H



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD ATAS LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

Hari : SABTU
Tanggal : 28 April 2018
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT:
 1. Pembukaan;
 2. Pembacaan Rekomendasi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017;
 3. Penyerahan Rekomendasi secara Simbolis oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati Rembang;
 4. Penutup.
- IV. PIMPINAN RAPAT
 1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 35 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Paripurna Istimewa tidak mengambil keputusan, dimana dalam pelaksanaannya tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota, maka dengan mengucap *"Bismillaahirrohmaanirrohiim"* tepat pukul 12.10 WIB Rapat Paripurna Istimewa hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna istimewa hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017;
3. Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 secara simbolis oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati Rembang;
4. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yang merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna hari ini yaitu **Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017.**

Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa, Keputusan DPRD ini sebelumnya merupakan usul rekomendasi dari masing-masing komisi yang disetujui menjadi Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Untuk selanjutnya, saya minta kepada Saudara Puji Santoso, S.P., M. H. berkenan membacakannya.

Waktu dan tempat dipersilahkan.

**====PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2017=====**

➤ *(Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 terlampir)*

Terima kasih Saudara Puji Santoso, S.P., M. H. bantuannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Demikian tadi Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017. Terdapat beberapa masukan, himbauan, saran maupun koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2017, yang secara lengkap termaktub dalam lampiran Keputusan DPRD. Keputusan DPRD ini selanjutnya akan diserahkan kepada Saudara Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, sehingga Kabupaten Rembang menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Agar pelaksanaan penyerahan berjalan lancar, saya minta kepada Sekreteriet DPRD untuk memandu jalannya penyerahan surat Keputusan

==== **PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN DPRD** ====

Terimakasih Sekretariat DPRD atas waktunya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda pembacaan dan penyerahan Keputusan DPRD telah kita laksanakan, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini.

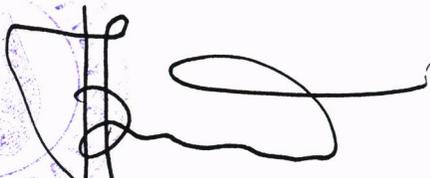
Akhirnya dengan mengucapkan “*Alhamdulillah*” tepat pukul 12.30 WIB Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS, *A*



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19670421 199303 1 009

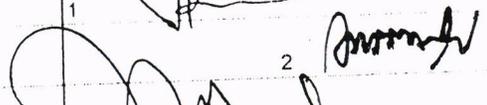
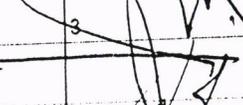
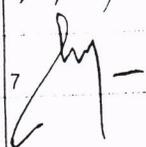
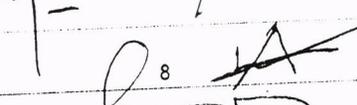
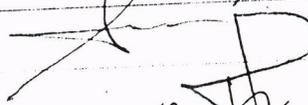
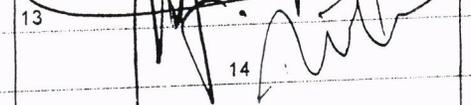
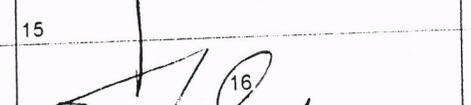
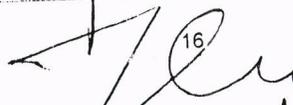
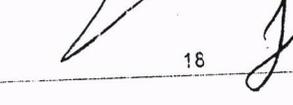
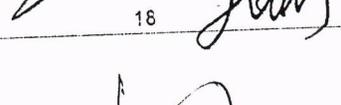
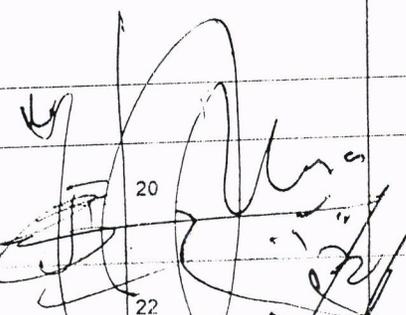
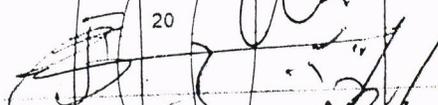
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) ISTIMEWA
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG
PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Nomor Tahun 2018
Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Akhir Tahun Anggaran 2017;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SABTU, 28 APRIL 2018
PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KE1
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL, MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd., M.H.	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E.	Anggota		
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, B A	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM		
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD
26	JASMANI	Anggota
27	WIDODO	Anggota
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota
31	FRIDA IRIANI	Anggota
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota
FRAKSI PARTAI GERINDRA		
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota
34	H. CHASANUDDIN	Anggota
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota
FRAKSI KARYA SEJAHTERA		
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota
FRAKSI HARAPAN		
42	SUKARMAIN	Anggota
43	S'AHNINGSIH, S.E.	Anggota
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R. S.Pd.	Anggota
45	NUR JANNAU	Anggota

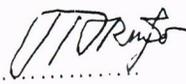
Keterangan :

1 I : Ijin
2 S : Sakit



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SABTU, 28 APRIL 2018
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	<i>HARIYANTO</i>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	Kepolisian Resort Rembang	6.
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.

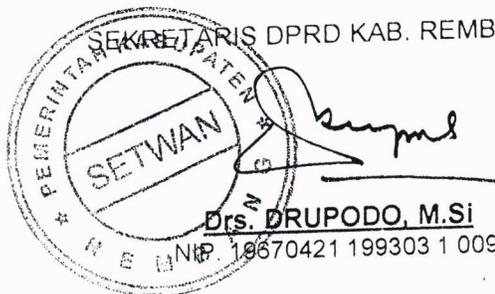

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

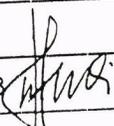
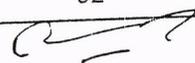
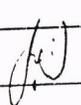
Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SABTU, 28 APRIL 2018
 PUKUL : 10.00 WIB

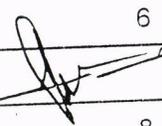
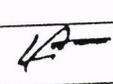
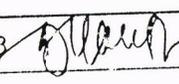
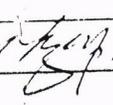
N O	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	10
11	CAMAT SEDAN	<i>M. ang</i>	11 <i>M</i>
12	CAMAT SLUKE	12
13	CAMAT KRAGAN	<i>M. ang</i>	13 <i>JF</i>
14	CAMAT SARANG	14

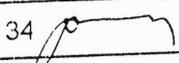
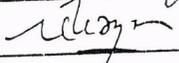
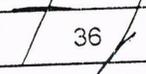
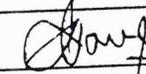
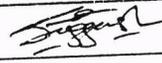
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

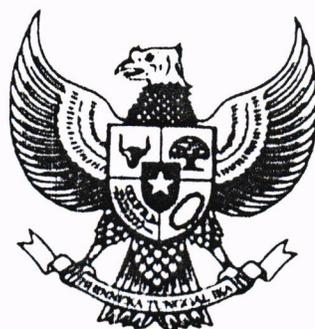
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
70	PERUM PEGADAIAN			70
71	BSM.BANK DANAMON			71
72	DHARMA WANITA PERSATUAN			72
73	GERAKAN PRAMUKA			73
74	PMI CAB. REMBANG			74
75	STIE. YPPI REMBANG			75
76	DPC PPP			76
77	DPC PARTAI DEMOKRAT			77
78	DPD PARTAI GOLKAR			78
79	JPD PAN			79
80	DPC PARTAI HANURA			80
81	DPC PKS			81
82	DPC PARTAI NASDEM			82
83	DPC PARTAI GERINDRA			83
84	DPC PKB			84
85	DPC PDI PERJUANGAN			85
86	SUARA MERDEKA			86
87	CAKRA TV			87
88	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	88 
89	RADIO R2B			89
90	MAJALAH BANGKIT			90
91	PATI EKSPRESS			91
92	RADIO MATA AIR			92
93	HIMBAH BAKYAT			93 
94	Kedim	Agus		94 
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA(III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SABTU, 28 APRIL 2018
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	Hum effendi	AS 3	7 
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Lat'ifah	Kes	13 
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD			16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	Nijayanti	Kabid Ekspansi Rembang	18 
19	DINSOSP2KB	NGAT III	suat	19 
20	BKD	MARSONO	KARIN	20 
21	BPRD	Mulcaurminingsih	Shalin	21 
22	DPU TATA RUANG	SUTATHARPO	KADINOS	22 
23	DPKP/ DINPERKIM			23
24	DINAS KESEHATAN			24
25	DINDIKPORA	Nyong RT	Agam	25 
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Akh Simde	Kadinas	26 
27	DINTANPAN			27
28	DINLUKLIK	Upanman	haring	28 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Karsana	SEKDIR	33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Murpa	sekdi	34 
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO		35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Murtogus	Kobid	36 
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Agus Seto A. d. mbetv		38 
39	SATPOL PP	PAMUDJI	SEKDIR	39 
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M	Hernawan	Ka Adm Kay	41 
42	PERCETAKAN DAERAH	GANGGA Sihomery	ka. Unit	42 
43	PD. BANK PASAR			43
44	PT. MIGAS REMBANG ENERGY	ZAEUL ABIFIN	DIPR	44 
45	BANK BNI 46			45
46	BANK JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	PD BPR BKK LASEM			48
49	PT. R B S J			49
50	APOTIK DAERAH			50
51	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			51
52	DIPENDA PROPINSI			52
53	BPS KAB. REMBANG			53
54	RUMAH TAHANAN			54
55	PERHUTANI KPH MANTINGAN			55
56	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			56
57	KANTOR PERHUTANI SPH IV			57
58	KANTOR POS DAN GIRO			58
59	TELKOM REMBANG			59
60	PLN CAB. REMBANG			60
61	BAWASLU KAB. REMBANG			61
62	B P N KAB. REMBANG			62
63	KANTOR PAJAK			63
64	UP3AD (ASET DAERAH)			64
65	KANTOR PEI ABUHAN			65



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dilakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2017, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jaminan Sosial Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pegawai Negeri sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

30. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
38. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Internal Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun 2017 pada tanggal 27 April 2018.

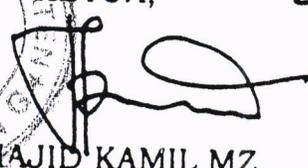
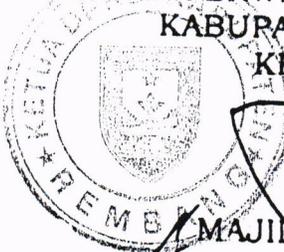
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 April 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA, 

MAJID KAMIL.MZ

LAMPIRAN : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang
Nomor : 9 Tahun 2018
Tanggal : 28 April 2018

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI REMBANG TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN

Sebagai aktualisasi prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seluruh pemerintah daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah disetiap akhir tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. LKPJ merupakan laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran yang idealnya dapat memberikan gambaran kinerja tahunan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambaran kinerja tahunan tersebut secara implisit merupakan akumulasi ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengendalian yang ditunjang oleh seluruh *stakeholders*.

Penyusunan LKPJ Kepala Daerah akhir tahun anggaran mempunyai tujuan antara lain: *pertama*, sebagai laporan Hasil kerja pemerintahan kepada DPRD sekaligus merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD; *kedua*,

sebagai bahan untuk mengukur keberhasilan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; *ketiga*, melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan *keempat*, memberikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada publik melalui lembaga perwakilan rakyat guna mendapat evaluasi, masukan dan penilaian dalam bentuk catatan strategis guna perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan. Dengan demikian, LKPJ Kepala Daerah yang disampaikan kepada DPRD merupakan *Progress Report* pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah yang menjelaskan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Mengakhiri pelaksanaan tahun anggaran 2017, Bupati Rembang telah menyampaikan dokumen LKPJ tahun 2017 kepada DPRD Kabupaten Rembang, melalui rapat paripurna DPRD. Tahun anggaran 2017 merupakan tahun ke 2 (dua) dari periode RPJMD Kabupaten Rembang 2016 - 2021, tahun dimana telah selesainya konsolidasi politik pasca pilkada 2015, menuju tahun pemantapan program dan kegiatan. Sebagai tahun kedua RPJMD, maka LKPJ tahun 2017 merupakan tahun pertanggungjawaban yang penting dan strategis bagi pemerintahan baru, karena merupakan tahun evaluasi kinerja tahapan awal perencanaan lima tahunan, artinya dari data dan informasi capaian yang ada dalam dokumen LKPJ tersebut akan dapat diketahui apakah pemerintah daerah Kabupaten Rembang sampai dengan tahun ke dua ada pada *track* yang benar atau menyimpang dari perencanaan lima tahunan (RPJMD) tersebut.

Sejalan dengan peran DPRD sebagai mitra sejajar Pemerintah daerah, harmonisasi hubungan kerja yang seimbang dan egaliter antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam konteks tata laksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah sangat menentukan tercapainya situasi yang kondusif bagi keberhasilan program-program pembangunan di daerah. Sehingga tercapainya keberhasilan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan sebagaimana amanah undang-undang nomor 23 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah, dan DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki 3 fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan, sebagaimana tertuang dalam pasal 153 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014, yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perbup serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan DPRD salah satunya terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang keseluruhan hasil kerja itu sendiri tertuang dalam LKPJ. Selanjutnya dalam menyikapi LKPJ tersebut, DPRD diamanatkan untuk melakukan pembahasan internal sesuai tata tertib DPRD, guna melakukan pendalaman atas LKPJ dan merumuskan keputusan DPRD, berupa catatan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, dengan mengacu tata cara penyampaian LKPJ sebagaimana peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007, DPRD Kabupaten Rembang berupaya agar tidak kehilangan momentum penting dalam proses pembahasan LKPJ tahun 2017, dengan cara meningkatkan kualitas pembahasan guna penyempurnaan kebijakan pembangunan yang lebih baik dibanding

periode yang lalu, sesuai azas pemerintahan yang baik, lebih efisien dan efektif, lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembahasan LKPJ tahun 2017, DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan serangkaian kegiatan, seperti: pembahasan internal, diskusi dengan tenaga ahli, kunjungan kerja untuk pembuktian di lapangan, rapat kerja dengan perangkat daerah terkait dan lain-lain, hasilnya menjadi dasar perumusan catatan dan rekomendasi strategis DPRD untuk perbaikan kebijakan publik pemerintah daerah pada masa yang akan datang.

Hasil keputusan DPRD Kabupaten Rembang berupa catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Rembang tahun 2017, perlu disepakati bersama sebagai media evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang akhirnya bermuara pada terciptanya keharmonisan hubungan kerja antara kepala daerah dengan DPRD sesuai dengan fungsinya masing-masing menuju Kabupaten Rembang yang lebih baik kedepan.

B. ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH

Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah pada tahun 2017 dapat dinilai melalui ukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai target capaian kinerja Visi dan Misi RPJMD pada tahun 2017. Artinya dengan menyandingkan capaian kinerja LKPJ tahun 2017 dengan target indikator Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka segera diketahui sejauhmana capaian keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan tujuan serta sasaran daerah setiap tahunnya, dengan asumsi bahwa RKPD tahun 2017 disusun secara konsisten dengan RPJMD.

Melalui penelusuran dokumen RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021, Visi Kabupaten Rembang 2016-2021 adalah "Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat

Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan”, selanjutnya untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 7 misi. Berdasar keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja, untuk mengukur keberhasilan 7 misi tersebut terdapat 21 Tujuan, 38 sasaran serta 84 indikator beserta target kinerjanya.

Namun sangat disayangkan bahwa dokumen LKPJ Kabupaten Rembang tahun 2017 belum melaporkan seluruh capaian dari setiap indikator sebagaimana telah disepakati dalam RPJMD 2016 – 2021. Dari 84 indikator pengukuran kinerja setiap misi dalam dokumen RPJMD tersebut, indikator kinerja yang dilaporkan capaian target kinerjanya dalam LKPJ 2017 hanya 26 indikator, sedangkan sisanya sebanyak 58 indikator tidak dilaporkan capaiannya (*not available*). Adapun hasil rekapitulasi jumlah indikator yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan capaian kinerjanya berdasarkan Misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.
Rekapitulasi Capaian Indikator Berdasarkan Misi
Dalam LKPJ Bupati Rembang 2017

Misi	Indikator Kinerja				
	Tercapai	Tidak Tercapai	n.a	Jumlah	%
1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah	2	1	13	16	13 %
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup	2	3	7	12	17 %

3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif	1	-	5	6	17 %
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.	4	1	7	12	33 %
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.	2	2	8	12	17 %
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	2	5	14	21	10 %
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.	1	-	4	5	20 %
Jumlah	14	12	58	84	17 %

Sebagian besar data capaian indikator dalam dokumen LKPJ Bupati Rembang Tahun 2017 belum tersaji secara lengkap menyebabkan kemajuan capaian Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran pembangunan daerah sulit untuk dinilai secara obyektif. Demikian pula, tidak banyak informasi yang dapat digali dari laporan capaian indikator makro ekonomi dalam LKPJ 2017, karena minimnya informasi serta dukungandata yang disajikan. Dokumen LKPJ Kabupaten Rembang tahun 2017, juga belum melaporkan data capaian indikator makro ekonomi dan sosial tahun 2017 secara terstruktur dan lengkap konsisten dengan yang diamanatkan dalam

RPJMD. Dokumen LKPJ hendaknya dapat mendiskripsikan data-data capaian indikator ekonomi makro dan sosial, paling tidak seperti Penetapan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 sub bab indikator makro dan agregat. Data-data capaian indikator ekonomi makro dan sosial sangat krusial bagi penilaian keberhasilan pembangunan. Kondisi ini mengingatkan Kabupaten Rembang mempunyai target yang cukup tinggi dalam pengentasan kemiskinan, pengangguran, kesejangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus dicapai hingga akhir periode RPJMD 2016-2021.

Kendala dalam menyajikan data dan informasi kinerja secara tepat waktu dan akurat hendaknya menjadi momentum kesadaran kolektif bagi semua pihak agar lebih meningkatkan kompetensi, koordinasi dan kerjasama dalam fungsi pengendalian, evaluasi serta pengelolaan data statistik di Kabupaten Rembang. Namun persoalan yang lebih mendasar adalah perlunya penyempurnaan dalam tahap perumusan rencana kerja pemerintah daerah guna mempertajam dan memastikan bahwa *output* kegiatan serta *outcome* program secara konsisten selalu berorientasi pada pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

C. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Senada dengan penyajian substansi arah kebijakan umum pemerintahan daerah, minimnya data dan informasi yang tersaji serta miskinnya penjelasan laporan keuangan daerah yang disajikan menyebabkan tidak banyak informasi yang dapat di ungkap dan dipelajari untuk disimpulkan dari dokumen LKPJ Bupati Rembang tahun 2017 terkait pengelolaan keuangan daerah.

Namun dari data dan informasi yang minim tersebut dapat di sampaikan beberapa catatan terkait realisasi keuangan daerah tahun 2017 sebagai berikut: 1) Dokumen LKPJ Bupati Rembang tahun 2017 pada pembahasan tentang Kebijakan Pengelolaan keuangan daerah

tahun 2017, telah melaporkan bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang tahun 2017 kurang dari target sebesar Rp.24.691.060.070,- atau terealisasi sebesar 98,6% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2017. Sementara realisasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp.139.896.819.306,- atau terealisasi 92,9% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2017. APBD tahun 2017 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit Rp.205.430.067.710,- pada realisasinya defisit berkurang tinggal sebesar Rp.90.224.308.473,- sebagaimana yang nampak dalam ringkasan realisasi anggaran daerah tahun 2017; 2) Pembiayaan netto tahun 2017 tidak dilaporkan, sehingga tidak diketahui penggunaan SILPA tahun 2016 sebesar Rp.151.320.194.429,- pada APBD setelah Perubahan tahun 2017 dipergunakan untuk apa saja; 3) Karena tidak adanya laporan realisasi pembiayaan daerah tahun 2017 maka, disarankan agar DPRD meminta kelengkapan data realisasi kebijakan pembiayaan daerah tahun 2017 sebagaimana yang sudah teralokasikan dalam APBD perubahan 2017, agar diketahui penggunaan silpa tahun lalu, realisasi piutang daerah, realisasi dana cadangan, investasi, pembayaran pokok utang dll, dengan demikian besaran silpa tahun berjalan (tahun 2017) dapat diketahui; dan 4) Laporan silpa tahun berjalan 2017 (*unaudited*) harus dilengkapi dengan obyek dan rincian obyek sumbernya, agar dapat diketahui sejak dini, berapa besaran silpa yang dapat dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun 2017, dan berapa besaran silpa tahun berjalan yang sudah terikat penggunaannya.

1. Kinerja Pendapatan daerah tahun 2017

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang tahun 2017 tidak memenuhi target sebesar Rp.24.691.060.070,- atau terealisasi sebesar 98,6% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2017. Dari Pendapatan Rp. 1.763.604.831.110,- yang ditargetkan dalam APBD Perubahan 2017

ter-realisasi sebesar Rp. 1.738.913.771.040. Pada kelompok PAD pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah memenuhi/melampaui target sedangkan retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memenuhi target. Pada kelompok dana perimbangan dari jenis DAK tidak memenuhi target, sedangkan DAU melebihi target. Pada kelompok Lain-lain pendapatan yang sah seluruhnya tidak memenuhi target kecuali dana penyesuaian.

Seperti narasi LKPJ tahun sebelumnya, laporan dalam LKPJ tahun 2017 tidak menyajikan keterangan/penjelasan berbagai jenis pendapatan yang memenuhi dan tidak memenuhi target. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hendaknya berbagai capaian jenis pendapatan baik yang memenuhi/melampaui maupun yang kurang dari target disertai dengan penjelasan mengenai penyebab mengapa berbagai obyek pendapatan tersebut memenuhi/melampaui dan tidak memenuhi target. Faktor-faktor penyebab, pendorong dan penghambat keberhasilan dan ketidak berhasilan realisasi pendapatan daerah penting untuk di sampaikan dalam dokumen LKPJ secara transparan dengan informasi dan data yang layak dipercaya, agar Pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dapat mengambil pelajaran penting dari keberhasilan dan kegagalan tersebut. Jika tidak ada penjelasan tersebut maka LKPJ hanyalah sebatas laporan keterangan tanpa pertanggungjawaban.

Dari data realisasi APBD 5 (lima) tahun 2013-2017, kinerja pendapatan tahun 2017 meningkat dibanding tahun sebelumnya, ditengah tren penurunan pendapatan dari dana perimbangan pada tahun 2017, untuk Kabupaten Rembang justru pertumbuhan pendapatan agregatnya meningkat, dimana realisasi tahun 2017 pendapatan daerah dapat tumbuh 16,7%. Demikian juga dengan PAD walaupun beberapa jenis pendapatan tidak memenuhi target akan tetapi PAD secara agregat pertumbuhannya meningkat dibanding tahun sebelumnya, PAD tahun 2017 tumbuh 45,5% sangat progresif. Kinerja PAD tahun 2017 yang mulai

kembali membaik tersebut, hendaknya terus dijaga agar kedepan dapat dipertahankan bahkan kinerjanya lebih baik lagi. Untuk itu kebijakan pendapatan khususnya kebijakan PAD tahun 2017 yang benar benar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah agar dilanjutkan, tentu setelah dievaluasi masalah, tantangan, hambatan dan kekurangannya, kebijakan yang bersifat tradisional harus segera di gantikan dengan yang lebih modern seperti pemanfaatan IT penggunaan data base, penegakan hukum, *Reward & Punishment* pada pengelolaan PAD, dengan demikian harapannya kinerja PAD tahun 2018 akan lebih membanggakan.

Upaya lainnya, disamping meningkatkan kualitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang setiap tahun di implementasikan, diperlukan tererosan kebijakan yang cukup kreatif. Dari struktur alokasi pembiayaan tahun 2017 dan juga APBD tahun 2018 nampak bahwa, Pemerintah Kabupaten Rembang selama ini masih sangat konvensional dalam mengelola pembiayaan pembangunan, untuk membangun daerahnya hanya mengandalkan dana yang di dapat saja yaitu dari sumber PAD dan dana perimbangan baik pusat maupun transfer dari provinsi, belum cukup kreatif memanfaatkan sumber pembiayaan lainnya seperti utang/obligasi daerah atau pemanfaatan bahkan penjualan aset daerah yang kurang bermanfaat, kerja sama dengan swasta dll. Sudah seharusnya pada masa yang akan datang pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah, utamanya untuk pemenuhan percepatan infrastruktur dasar publik dan peningkatan kualitas pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah menempuh cara yang lebih modern dengan memanfaatkan salah satunya instrument misalnya penerbitan obligasi daerah.

2. Kinerja Belanja daerah tahun 2017

Realisasi Belanja daerah tahun 2017 kurang dari alokasi sebesar Rp. 139.896.819.306,- atau ter-realisasi 92,9%,- dari target. belanja daerah sebesar Rp. 1.969.034.898.819,- yang dialokasikan

dalam APBD Perubahan 2017 ter-realisis sebesar Rp. 1.829.138.079.513,- belanja tidak langsung terrealisasi 96,5% sedangkan belanja langsung terrealisasi sebesar 88,5%. Sebagaimana yang nampak dalam table ringkasan realisasi berikut ini: Kinerja belanja daerah tahun 2017 hampir stagnan dibanding tahun 2016, Belanja daerah tahun 2017 terrealisasi sebesar 92,9%, sementara tahun 2016 realisasinya sebesar 92,6%. Oleh karena itu masih diperlukan kerja keras agar serapan anggaran lebih baik lagi agar peningkatan tingkat serapannya lebih progresif yaitu paling tidak $\geq 95\%$ (lebih besar sama dengan 95% dari alokasi).

Masih terdapat sisa belanja yang cukup tinggi pada belanja langsung, tahun 2017 sisa belanja langsung sebesar Rp. 101.293.238.813,- artinya serapannya belum maksimal, memang belanja langsung kinerjanya sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya, tahun 2017 realisasi belanja langsung sebesar 88,5% sedangkan tahun 2016 hanya 85,2% dari alokasi yang disediakan. Sayangnya dokumen LKPJ tidak menyajikan penyebab belum maksimalnya realisasi belanja langsung tahun 2017 ini. Untuk itu diperlukan penjelasan lebih rinci agar dapat diketahui masalah yang masih menjadi hambatannya, sebagai dasar untuk peningkatan serapan belanja langsung pada masa yang akan datang, hal ini penting karena tahun 2018 dan juga 2019 merupakan tahun pertengahan RPJMD 2016-2021 yang artinya tahun pemantapan menuju percepatan pembangunan mewujudkan Visi dan Misi daerah yang tentunya memerlukan pendanaan yang lebih besar untuk pemantapan program dan kegiatan.

Sisa belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji, tunjangan PNS, Bupati Wabup dan DPRD masih diatas besaran akress 2,5 %, atau terealisasi 94,8%% atau tersisa 5,2% dari alokasi, jika administrasinya baik dan perencanaannya akurat seharusnya realisasi gaji dan tunjangan PNS sisanya tidak melebihi besaran akresnya. Proporsi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung (Gaji dan tunjangan PNS) tahun 2017 menurun dibanding tahun 2016, yaitu sebesar 34,0% dari total belanja daerah, artinya keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2017 semakin sehat. Hal ini tentu patut dipertahankan, karena dengan mampu ditekannya belanja pegawai akan meningkatkan ruang fiskal daerah, ruang fiskal yang semakin lebar menunjukkan kemampuan menyediakan belanja untuk pembangunan (belanja program/kegiatan) meningkat.

Realisasi belanja langsung tahun 2017 sebesar Rp.778.791.261.846,- dari alokasi Rp.880.084.500.660,- atau ter realisasi sebesar Rp. 88,5%, Atas tingkat realisasi belanja langsung yang masih dibawah 90% tersebut maka, masih diperlukan kerja keras agar tingkat realisasinya dapat mencapai $\geq 95\%$ (minimal lebih besar sama dengan 95% dari alokasi) dengan demikian seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD.

Hal yang cukup menggembirakan pada realisasi belanja daerah Rembang adalah, Pada tahun 2017 Struktur belanja langsung masih konsisten cukup produktif, dari hasil analisis data realisasi APBD 2013 - 2017 didapat bahwa selama dua tahun terakhir belanja modal alokasi dan realisasinya lebih besar dibanding jenis belanja barang jasa dan belanja pegawai (honorarium dan upah), kebijakan belanja daerah yang produktif tersebut tentu akan menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah,

mempercepat penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar publik dan pembentukan aset daerah jadi cepat meningkat. Untuk itu disarankan agar, kebijakan belanja langsung yang cukup produktif tersebut supaya terus dipertahankan, sampai kebutuhan infrastruktur dasar publik Kabupaten Rembang cukup, memadai dan standar. Namun demikian harus tetap dijaga agar infrastruktur publik yang dibangun memperhatikan kualitas sehingga lebih kuat dan tahan lama.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2017 sebesar Rp. 250.438.833.078 lebih meningkat Rp. 31 M lebih dibanding anggaran tahun 2016, demikian juga belanja pegawai juga meningkat dari Rp. 145 M di tahun 2016 menjadi Rp.175 M pada tahun 2017, mengingat besarnya realisasi belanja barang dan jasa dan belanja pegawai pada kelompok belanja langsung setiap tahunnya, diharapkan dokumen LKPJ dapat menyajikan rincian realisasi 2017 berdasarkan obyek/rincian obyek belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Informasi tersebut akan sangat berguna jika pada masa yang akan datang jenis belanja ini dapat dirasionalisasikan untuk meningkatkan belanja modal.

D. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi

1. Urusan Wajib

a. Pendidikan

Urusan pendidikan pada Tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 583.789.810.076,58,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 529.968.701.213,- atau hanya terserap sebesar 90,78% yang meliputi 10 program dan 141 kegiatan. Merujuk pada dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, urusan pendidikan pada tahun 2017 memperoleh mandat untuk mencapai target indikator kinerja meliputi APK PAUD, APS usia 7-12 th, APS usia 13-15 th, persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, RLS dan HLS. Dari indikator

tersebut, dokumen LKPJ justru belum menyampaikan pencapaian indikator-indikator tersebut. Sementara yang dilaporkan adalah indikator kinerja kunci bidang pendidikan yang tidak berkaitan langsung dengan indikator pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD.

b. Kesehatan

Urusan kesehatan pada Tahun 2017 melaksanakan 23 program dan 125 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 313.203.306.258 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.287.423.564.069 atau hanya terserap sebesar 91,77 % dari total anggaran. Sementara mendukung layanan kesehatan RSUD Dr. Sutrasno pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 313.203.306.258,60,- dengan serapan sebesar Rp. 287.423.564.069,22 atau hanya sebesar 91,8%. Terkait dengan target capaian kinerja RPJMD, laporan LKPJ tahun 2017 belum menyajikan capaian kinerja urusan kesehatan yaitu AKI, AKB, Akaba, serta Prevalensi gizi buruk. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan tahun 2017 yang telah dilaporkan adalah tingkat capaian standar pelayanan minimal (SPM).

c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk mendukung Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 sebesar Rp. 172.405.297.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 151.015.497.945,- atau hanya terserap sebesar 87,6% yang diimplementasikan melalui 14 program dan 43 kegiatan. Terkait capaian RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diamanatkan untuk mencapai indikator kinerja meliputi persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik, persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik, jumlah pusat pertumbuhan baru, persentase RTH dan

persentase akses irigasi dalam kondisi baik. LKPJ tahun 2017 telah melaporkan tercapainya target indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik yang mencapai 62% atau sepanjang 398,5 km dari total panjang jalan kabupaten yaitu 642,75 km dari target RPJMD sebesar 60,98%. Sedangkan luas jaringan irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 81% yakni seluas 17.167 ha dari total luas irigasi Kabupaten Rembang 21.193 ha dari target RPJMD sebesar 83,67%. Sementara indikator persentase RTH juga baru tercapai 7,7% dari target RPJMD sebesar 14,76%.

d. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Anggaran yang di alokasikan untuk mendukung urusan perumahan dan kawasan permukiman pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 39.563.984.000 yang dengan realisasi keuangan Rp. 36.051.784.063,00 atau hanya terserap sebesar 91,12% melalui pelaksanaan 1 program dan 35 kegiatan. RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 menetapkan indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman meliputi persentase luas kawasan kumuh, persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum, persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi layak, persentase cakupan air baku, serta persentase RTLH yang tertangani. Penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dalam LKPJ tahun 2017 telah menyampaikan capaian indikator rumah tangga pengguna air bersih yang baru tercapai sebesar 73,30 % dari target RPJMD sebesar 92% atau sejumlah 141.386 rumah tangga dari jumlah total rumah tangga sejumlah 192.874; tercapainya persentase kawasan kumuh perkotaan dari target RPJMD sebesar 3,8% menjadi sebesar 0,29 % yaitu proporsi kawasan kumuh seluas 290,45 hektar dari total permukiman seluas 101.408,035 hektar; dan Proporsi rumah

layak huni mencapai 75,10 % atau sejumlah 132.558 unit dari jumlah seluruh rumah 176.505 unit atau RTLH masih sebesar 24,9% dan tidak dilaporkan persentase penanganannya.

e. Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk pelaksanaan ketertiban umum sebesar Rp. 4.609.500.000 dengan realisasi Rp. 4.252.403.534 serta perlindungan masyarakat untuk penanggulangan bencana sebesar Rp. 11.604.290.000 dengan realisasi keuangan Rp. 11.178.159.725 atau terserap sebesar 96,33%. Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 untuk urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi rasio linmas per 1000 penduduk, Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih, cakupan penegakan perda dan perkara, serta program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Namun demikian dokumen LKPJ tahun 2017 belum melaporkan semua indikator tersebut.

f. Sosial

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang sosial tahun 2017 sebesar Rp. 8.319.433.000 dengan realisasi keuangan Rp. 7.987.103.479 atau terserap sebesar 96,01% yang diimplementasikan melalui 10 program dan 46 kegiatan. Indikator RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 untuk urusan sosial hanya mencakup satu indikator yaitu persentase PMKS yang tertangani. Capaian indikator kinerja bidang sosial pada tahun 2017 dalam LKPJ hanya melaporkan jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yaitu sebanyak 83 orang. Namun demikian persentasenya belum dilaporkan sehingga sulit diketahui jumlah keseluruhan PMKS yang harus ditangani.

95% dari alokasi. Pada tahun 2017 Struktur belanja langsung masih konsisten cukup produktif, bahwa selama dua tahun terakhir belanja modal alokasi dan realisasinya lebih besar dibanding jenis belanja barang jasa dan belanja pegawai (honorarium dan upah), Untuk itu disarankan agar, kebijakan belanja langsung yang cukup produktif tersebut supaya terus dipertahankan, sampai kebutuhan infrastruktur dasar publik Kabupaten Rembang cukup, memadai dan sesuai standar.

3. Dalam hal penyelenggaraan urusan desentralisasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan sekaligus dijadikan rekomendasi DPRD Kabupaten Rembang, yakni ;

a. Pencapaian tujuan dan sasaran OPD yang merupakan turunan dari Visi dan Misi Kabupaten Rembang yang terdapat di dalam RPJMD 2016-2021 sebagian besar tidak dilaporkan dalam dokumen LKPJ. Ukuran pencapaian kinerja bagi OPD sangat bertumpu kepada pencapaian target serapan anggaran. Akibatnya OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya lebih berorientasi kepada proyek dibanding pencapaian *outcome* dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal ini DPRD merekomendasikan kepada Bupati perlunya melakukan perubahan paradigma pembangunan ditataran pimpinan OPD dari orientasi proyek yang sesaat kepada orientasi pembangunan yang berkelanjutan, perubahan paradigma tersebut akan dapat terwujud manakala proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan dan kinerja OPD Kabupaten Rembang lebih ditingkatkan.

b. Dalam pencapaian *outcome* dari program dan kegiatan OPD, faktor penetapan prioritas dan pagu anggaran OPD juga punya pengaruh yang sangat signifikan. Untuk itu DPRD merekomendasikan kepada Bupati, dalam rangka penyusunan perencanaan penganggaran ke depan diubah menjadi "*money*

kemiskinan, pengangguran, kesejangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus dicapai hingga akhir periode RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021. Hal ini hendaknya menjadi momentum kesadaran kolektif bagi semua pihak agar lebih meningkatkan kompetensi, koordinasi dan kerjasama dalam fungsi pengendalian, evaluasi serta pengelolaan data statistik di Kabupaten Rembang. Oleh karenanya, DPRD merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Rembang kedepan perlu dibentuk tim OPD yang lebih kuat, solid dan memahami filosofi sesungguhnya dari tupoksi OPD yang dipimpinnya dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021.

2. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2017, kinerja pendapatan patut diapresiasi karena memencapai telah mencapai pertumbuhan tertinggi, dimana realisasi tahun 2017 pendapatan daerah dapat tumbuh 16,7%. Demikian juga dengan PAD walaupun beberapa jenis pendapatan tidak memenuhi target akan tetapi PAD secara agregat pertumbuhannya meningkat dibanding tahun sebelumnya, PAD tahun 2017 tumbuh 45,5% sangat progresif. Untuk itu DPRD merekomendasikan agar bidang pendapatan harus mendapat insentif yang memadai dan kedepan harus ada satu formulasi dan model pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih efektif dan produktif, sehingga apa yang ditargetkan dalam perencanaan dapat terpenuhi dalam pencapaian. Kemudian kami juga merekomendasikan dalam hal peningkatan perolehan pajak dan retribusi daerah perlunya apresiasi kepada wajib pajak yang patuh membayar pajak, wadah dan kegiatan bersosialisasi antara wajib pajak dengan pihak pengelola pajak daerah, sehingga apa yang menjadi kendala antara wajib pajak dan petugas pajak bisa diminimalisir. Namun demikian kinerja belanja masih diperlukan kerja keras agar serapan anggaran lebih baik lagi agar peningkatan tingkat serapannya lebih progresif yaitu paling tidak \geq

kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga yang dimaksud tidak menggambarkan capaian *output* dan *outcome* dari kerja sama itu sendiri.

Berkaitan dengan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, bersumber dari APBD Kabupaten Rembang sebesar Rp. 2.634.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.582.862.700,- atau terserap 98,00% yang melibatkan 12 instansi vertikal difasilitasi melalui 17 jenis kegiatan. Namun laporan LKPJ, belum menggambarkan capaian *output* dan *outcome* dari koordinasi yang dilaksanakan.

G. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan, monitoring ke lapangan dan kajian terhadap buku LKPJBupatiRembang tahun 2017 maka DPRD Kabupaten Rembang memberikan kesimpulan sekaligus sebagai saran dan rekomendasi terhadap LKPJBupatiRembang tahun 2017 sebagai berikut;

1. DPRD Kabupaten Rembang memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Eksekutif atas tersusunnya buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2017. Namun demikian dokumen LKPJ yang disajikan kurang lengkap karena tidak disertai dengan data dan informasi yang memadai terkait target rencana dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan capaiannya, sehingga tidak bisa dilihat tingkat keberhasilannya, dengan demikian kualitas LKPJ ini dirasakan kurang memuaskan dan sulit dipahami, dimana belum menggambarkan capaian Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran pembangunan daerah. Kondisi ini sangat krusial bagi penilaian kemajuan (*progress*) target capaian, mengingat Kabupaten Rembang mempunyai target yang cukup tinggi dalam pengentasan

Manajemen Eselon I, Fasilitasi pupuk dan pestisida, data layanan operasional pengasawasan pupuk subsidi, Fasilitasi pembiayaan pertanian dan layanan dan pembinaan kegiatan pembiayaan pertanian dengan hasil yang dilaporkan adalah meningkatnya Luas Areal Tanam Melalui Indeks Pertanaman dan/atau Intensitas Pertanaman (IP). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang juga tidak melaporkan tingkat capaian *output* maupun *outcome* secara kuantitatif dan terukur, sehingga DPRD tidak dapat melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pertanian.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang memperuntukkan anggaran tugas pembantuan pada upaya pengelolaan ruang laut dengan output kegiatan untuk Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan serta fasilitasi Luas Lahan garam. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tidak menyampaikan capaian *output* maupun *outcome* secara kuantitatif dan terukur, dengan demikian DPRD juga tidak dapat menilai pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kelautan.

F. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pada tahun 2017, Kabupaten Rembang melaksanakan 7 kerja sama antar daerah yaitu 1) Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2) Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Blora, Tuban Dan Bojonegoro, 3) Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang Dan Blora, 4) Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Tojo Una-Una Dan Kapuas, 5) Kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 6) Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan 7) Kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan dalam hal kerja sama daerah dengan pihak ketiga terdapat 16 kerja sama yang dibuat yang pelaksanaannya oleh diampu oleh 9 OPD Kabupaten Rembang. Pada laporan yang tertuang dalam buku LKPJ, OPD yang melakukan

Kementerian Perikanan dan Kelautan dengan sebesar Rp. 4.820.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.820.000.000,- (100,00 %).

Dari penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang perdagangan digunakan untuk Pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan, dari perencanaan, konstruksi fisik, pengawasan/supervisi dan administrasi kegiatan. Sesuai dengan laporan pada LKPJ kegiatan tersebut memberikan hasil peningkatan pengembangan kapasitas logistik dan sarana perdagangan, terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan peningkatan konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional. Namun Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rembang selaku penyelenggara tugas pembantuan di bidang perdagangan tidak melaporkan tingkat *output* maupun *outcome* secara kuantitatif dan terukur, sehingga DPRD tidak dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas pembantuan di bidang perdagangan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang menggunakan anggaran tugas pembantuan untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan tanaman obat, kawasan bawang merah, kawasan aneka cabai, dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura, layanan dukungan manajemen eselon 1 dan layanan perkantoran. Dokumen LKPJ memberikan laporan bahwa hasil kegiatan adalah terpenuhinya konsumsi cabai, bawang merah, jeruk dan aneka produk hortikultura lainnya dalam negeri dan ekspor. Adapun untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian melalui kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian jaringan irigasi tersier, irigasi permukaan, bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, dukungan teknis dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian, Layanan dukungan

pelaksanaan pembangunan di desa. Dana APBD untuk 14 kecamatan yang dialokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 44,3 Miliar dengan realisasi keuangan Rp. 42,3 Miliar atau terserap sebesar 95,58%.

E. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten /kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas bantuan dijelaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan tersebut diatur di dalam UU Nomor 23 tahun 2016 dan dijelaskan pada PP Nomor 7 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa urusan pemerintah yang dapat di tugaskan dari pemerintah kepada provinsi, kabupaten/kota dan atau desa didanai dari APBN. pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik antara lain pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan *output* dan menambah nilai aset pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2017 mendapat tugas pembantuan dari 3 kementerian yakni Kementerian Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan realisasi Rp. 6.000.000.000,- (100,00 %), Kementerian Pertanian untuk dua kegiatan dengan anggaran Rp. 4.505.000.000,- dan realisasi Rp. 4.505.000.000,- (100%) serta sebesar Rp. 1.303.080.000,- dan realisasi Rp. 1.303.080.000,- (100,00%),

Rp.18.262.767.000 dengan realisasi keuangan Rp.16.384.055.581 atau hanya terserap sebesar 89,71 %. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan keuangan daerah mencakup opini laporan BPK dan persentase peningkatan PAD. Adapun dokumen LKPJ tahun 2017 telah menyampaikan persentase kenaikan PAD sebesar 35,36% dari tahun 2016 sebesar 234,1 Miliar menjadi Rp. 316,9 Miliar yang berarti target RPJM sebesar 13,41% telah tercapai namun demikian opini laporan BPK belum dilaporkan.

f. Perencanaan Pembangunan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang perencanaan pembangunan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 6.439.500.000 dengan realisasi keuangan Rp. 6.325.223.359 atau terserap sebesar 98,2 % yang dilaksanakan melalui 13 program dan 81 kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan perencanaan pembangunan mencakup

Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan, Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA/PPA, RAPBD dan Perda APBD, serta Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan. Adapun dokumen LKPJ tahun 2017 belum melaporkan capaian indikator kinerja RPJMD tersebut.

g. Penunjang Pemerintah Kecamatan

Penunjang pemerintah kecamatan digulirkan untuk memenuhi kebutuhan 14 Kecamatan di Kabupaten Rembang dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan maupun fasilitasi dan koordinasi terhadap

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Sekretariat Daerah pada tahun 2017 sebesar 59,5 Miliar dengan realisasi keuangan Rp. 56,8 Miliar atau terserap sebesar 95,46 %.

b. Kepegawaian Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kepegawaian daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 6.149.500.000 dengan realisasi keuangan Rp. 5.783.314.409 atau hanya terserap sebesar 94,05%. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan kepegawaian adalah rata-rata nilai SKP. Adapun dokumen LKPJ tahun 2017 belum melaporkan capaian indikator kinerja RPJMD tersebut.

c. Sekretariat DPRD

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Sekretariat DPRD pada tahun 2017 sebesar Rp. 35.991.247.000 dengan realisasi keuangan Rp. 30.842.407.896 atau hanya terserap sebesar 85,69%. Capaian kinerja Fasilitasi DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2017 meliputi disetujuinya 8 Raperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dan terselenggaranya fungsi DPRD dengan baik di Kabupaten Rembang.

d. Pengawasan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pengawasan daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 10.860.177.000 dengan realisasi keuangan Rp. 10.301.719.831 atau hanya terserap sebesar 94,85%. Capaian kinerja pengawasan daerah pada tahun 2017 yaitu Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sebesar 71,61% atau sebanyak 459 dari total 641 rekomendasi.

e. Keuangan Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan keuangan daerah pada tahun 2017 sebesar

4) Perangkat Daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah tahun 2017 diantaranya adalah berupa Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM-nya, serta penyusunan regulasi dan kebijakan terkait dengan perangkat daerah dan tata laksana di Kabupaten Rembang.

5) Umum dan Keuangan

Capaian kinerja penyelenggaraan umum dan keuangan tahun 2017 yaitu terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran dan keuangan, terpenuhinya kebutuhan dinas, gedung dan kantor, terpeliharanya sarana dan prasarana, terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan terpeliharanya rumah dinas dan peralatan kantor maupun rumah tangga.

6) Kesejahteraan Rakyat

Capaian kinerja tahun 2017 yaitu terfasilitasinya kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, tersalurkannya bantuan sosial dan penguatan dalam bidang keagamaan.

7) Hubungan Masyarakat

Dengan capaian kinerja pada tahun 2017 meliputi tersedianya informasi dan penyebarluasan informasi melalui beberapa media seperti Majalah Bangkit serta media sosial Pemerintah Kabupaten Rembang.

8) Administrasi Pembangunan

Adapun capaian kinerja pengendalian program pembangunan daerah pada tahun 2017 antara lain: terselenggaranya pengendalian pembangunan berupa monitoring dan evaluasi sehingga pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan harapan; Terlaksananya fasilitasi pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

mendapat PDU. Adapun dokumen LKPJ tahun 2017 belum melaporkan capaian indikator kinerja RPJMD tersebut.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, maka dapat disampaikan beberapa fungsi yang menjadi fokus pada tahun 2017 diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Fasilitasi Hukum

Dengan kebijakan peningkatan kemampuan aparat pemerintahan dalam penyusunan peraturan Perundang-undangan (*legal drafting*) dan penyebaran informasi hukum dan HAM. Sejumlah produk hukum yang tersusun sesuai kaidah-kaidah *legal drafting* di tahun 2017 meliputi 8 Peraturan Daerah, 51 Peraturan Bupati, dan 1.724 Keputusan Bupati.

2) Administrasi Perekonomian Daerah

Capaian kinerja administrasi perekonomian daerah pada tahun 2017 terlihat pada distribusi beras miskin (*raskin*) di Kabupaten Rembang sebanyak 12.582,72 ton beras dengan jumlah penerima sebanyak 69.904 RTSM serta penyertaan modal sebesar 7,1 Miliar Rupiah ke beberapa Bank dengan penerimaan deviden sebesar Rp. 4.826.660.609.

3) Pemerintahan Umum

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum pada tahun 2017 diantaranya adalah : terpenuhinya kewajiban pemerintah daerah melaporkan kinerja kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat;

Serta terjalinnya kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten sekitar dan Kerjasama Kawasan RATUBANGNEGORO.

program dan 28 kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan perdagangan meliputi persentase pertumbuhan ekspor serta kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Adapun capaian kinerja bidang perdagangan dalam LKPJ tahun 2017 dapat ditunjukkan melalui indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rembang yang mencapai 13,50 % dari target 14,2% dengan nilai nominal sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan Ekspor Bersih Perdagangan sebesar Rp. 658.137.335.000,- masih perlu dihitung persentase pertumbuhannya.

e. Perindustrian

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang perindustrian pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.195.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.167.043.000 atau terserap sebesar 97,66% yang dilaksanakan melalui 8 program dan 16 kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan perindustrian meliputi kontribusi sektor industri pengolahan, persentase jumlah IKM serta jumlah klaster industri. Capaian kinerja bidang industri dalam LKPJ tahun 2017 berupa kontribusi sektor Industri terhadap PDRB sebesar 21,80% berarti telah melebihi target kinerja RPJMD sebesar 21,2%. Sedangkan capaian indikator kinerja RPJMD yang lain belum dilaporkan.

d. Bidang Transmigrasi

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang Transmigrasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 250.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 189.513.160 atau hanya terserap sebesar 75,8%. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan transmigrasi adalah jumlah transmigran yang

kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan Kelautan Dan Perikanan adalah pertumbuhan produksi perikanan budidaya per tahun. LKPJ tahun 2017 belum melaporkan capaian indikator kinerja RPJMD tersebut.

b. Pariwisata

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang kebudayaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.695.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 4.229.880.830 atau sebesar 74,27%. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan pariwisata adalah persentase pertumbuhan pendapatan ODTW dan kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD. Dalam LKPJ tahun 2017, capaian indikator kinerja RPJMD bidang pariwisata belum dilaporkan.

c. Bidang Pertanian

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang Pertanian pada Tahun 2017 sebesar Rp. 50.546.088.000 dengan Realisasi Keuangan Rp. 48.376.255.496 atau terserap sebesar 95,71% yang dilaksanakan melalui 23 program dan 99 kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan pertanian adalah NTP, produksi tanaman pangan, indeks peningkatan populasi ternak ruminansia serta indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian. Adapun dokumen LKPJ tahun 2017 belum melaporkan capaian indikator kinerja RPJMD tersebut.

d. Perdagangan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan perdagangan pada tahun 2017 sebesar Rp. 6.597.905.000 dengan realisasi keuangan Rp. 4.051.720.648 atau hanya terserap sebesar 61,41% yang dilaksanakan melalui 9

w. Perpustakaan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan perpustakaan pada tahun 2017 sebesar Rp 973.000.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 967.947.400 atau terserap sebesar 99,4 % yang dilaksanakan melalui 3 program dan 12 kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan perpustakaan adalah jumlah kunjungan perpustakaan per tahun. Dokumen LKPJ Tahun 2017 melaporkan capaian indikator jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 15.719 orang per tahun, yang berarti target RPJMD sebanyak 17.000 pertahun belum tercapai.

x. Kearsipan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan Kearsipan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.052.082.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.974.704.701 atau sebesar 96,23 yang dilaksanakan melalui 7 program dan 7 kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan Kearsipan adalah pengelolaan arsip secara baku. Capaian Kinerja urusan Kearsipan Kabupaten Rembang pada LKPJ tahun 2017 prosentase penerapan pengelolaan arsip secara baku di lingkungan perangkat daerah yaitu sebesar 55,31 % atau sebanyak 26 perangkat daerah yang berarti telah melampaui target RPJMD sebesar 55,3%

2. Urusan pilihan

a. Bidang Kelautan Dan Perikanan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan Kelautan Dan Perikanan pada tahun 2017 sebesar Rp. 24.388.550.642 dengan realisasi keuangan Rp. 21.593.464.405 atau hanya terserap sebesar 89,24% yang dilaksanakan melalui 12 program dan 50 kegiatan. Indikator

t. Statistik

Anggaran Tahun 2017 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan bidang statistik adalah sebesar Rp. 85.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 84.500.000 atau terserap sebesar 99,41% dilaksanakan melalui 1 program dan 1 kegiatan. RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 menetapkan indikator kinerja urusan statistik adalah persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan. Capaian indikator kinerja urusan statistik tersebut belum dilaporkan dalam LKPJ tahun 2017.

u. Persandian

Dalam rangka mencapai kebijakan dimaksud, maka dilaksanakan kegiatan pembinaan radio siaran dan radio komunikasi dengan total anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dengan realisasi Rp. 9.685.000 atau terserap sebesar 96,85%. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan persandian adalah persentase surat/santel yang dikelola, indikator kinerja tersebut belum dilaporkan dalam LKPJ tahun 2017.

v. Bidang Kebudayaan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang kebudayaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.005.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.651.230.300 atau hanya terserap sebesar 67,82% yang dilaksanakan melalui 3 program dan 19 kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan kebudayaan adalah persentase pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. LKPJ tahun 2017 melaporkan capaian kinerja urusan Kebudayaan yaitu persentase pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 79% yang berarti telah melampaui target RPJMD yaitu sebesar 12%.

melampaui target RPJMD sebesar 81%. Akan tetapi indikator rasio UMKM terhadap jumlah penduduk, serta persentase KSP/USP dan koperasi sehat belum dilaporkan dalam LKPJ tahun 2017.

r. Penanaman Modal

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang Penanaman Modal pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.111.700.000,- dengan realisasi keuangan Rp.2.953.981.368,- atau hanya terserap sebesar 94,9% yang dilaksanakan melalui 9 program dan 31 kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 untuk urusan penanaman modal adalah realisasi investasi PMA dan PMDN. Dokumen LKPJ tahun 2017 melaporkan pencapaian indikator kinerja urusan penanaman modal yaitu realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp. 5.01 Triliun yang berarti telah melampaui angka target RPJMD sebesar Rp. 4,3 Triliun.

s. Kepemudaan Dan Olah Raga

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2017 sebesar Rp.7.288.000.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.6.787.976.100, atau hanya terserap sebesar 93,14% yang dilaksanakan melalui 6 program dan 32 kegiatan. RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 menetapkan indikator kinerja urusan kepemudaan dan olahraga meliputi jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga provinsi dan nasional serta persentase organisasi kepemudaan yang dibina. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kepemudaan dan olah raga dalam LKPJ tahun 2017 belum melaporkan indikator kinerja RPJMD.

perhubungan meliputi persentase angkutan umum yang laik jalan serta persentase ketersediaan angkutan pedesaan. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang perhubungan yang dilaporkan dalam LKPJ tahun 2017 yaitu prosentase cakupan angkutan darat sebesar 0,18 %. Indikator yang disampaikan tersebut belum sesuai dengan penetapan indikator RPJMD.

p. Komunikasi Dan Informatika

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang komunikasi dan informatika pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.005.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.866.574.384,- atau terserap sebesar 93,07% yang dilaksanakan melalui 9 program dan 46 kegiatan. RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 menetapkan indikator kinerja untuk urusan komunikasi dan informatika meliputi skor PeGi, persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan, serta persentase PD yang mempunyai website aktif. Namun dokumen LKPJ tahun 2017 belum melaporkan indikator kinerja RPJMD tersebut.

q. Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan wajib bidang koperasi dan UKM pada tahun 2017 sebesar Rp. 11.416.668.000 dengan realisasi keuangan Rp. 10.933.360.811 atau sebesar 95,77% yang dilaksanakan melalui 17 program dan 43 kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 untuk urusan koperasi dan UKM meliputi persentase koperasi aktif, rasio UMKM terhadap jumlah penduduk, serta persentase KSP/USP dan koperasi sehat. Pada LKPJ tahun 2017, capaian kinerja pembangunan urusan koperasi dan UKM melalui indikator Koperasi aktif mencapai 90% dari jumlah koperasi sebanyak 315 unit yang berarti telah

pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaporkan dalam LKPJ tahun 2017 telah melampaui target RPJMD yaitu dari capaian presentase Posyandu Aktif sebesar 100 % yaitu sebanyak 1.228 kelompok. Akan tetapi indikator persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat belum dilaporkan.

n. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.021.052.000 dengan realisasi keuangan Rp. 3.841.670.154 atau hanya terserap sebesar 95,54.% yang dilaksanakan melalui 3 program dan 38 kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi cakupan peserta KB aktif, cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi, CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, persentase DO KB serta cakupan PUS ber KB anggota BKB. Capaian indikator kinerja penyelenggaraan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang telah dilaporkan dalam LKPJ tahun 2017 hanya indikator peserta KB aktif dengan capaian 84,11 % atau 115.959 dari jumlah 137.874 pasangan usia subur yang berarti belum mencapai target RPJMD sebesar 100%. Sedangkan indikator RPJMD lainnya belum dilaporkan dalam LKPJ tahun 2017.

o. Perhubungan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang Perhubungan pada tahun 2017 sebesar Rp. 21.462.572.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 19.719.962.384,- atau hanya terserap sebesar 91,88% yang dilaksanakan melalui 12 program dan 52 kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 untuk urusan

hidup (IKLH).Capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yang disajikan dalam LKPJ tahun 2017 masih berupa SPM dan belum melaporkan indikator kinerja RPJMD.

1. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 sebesar Rp. 5.669.756.000,- dengan realisasi keuangan yaitu sejumlah Rp. 5.432.170.192,- atau terserap sebesar 95,81% yang dilaksanakan melalui 4 program dan 33 kegiatan.RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 menetapkan indikator kinerja pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi persentase penduduk ber KTP serta persentase bayi berakte kelahiran.Capaian kinerja bidang kependudukan dan catatan sipil pada LKPJ tahun 2017 menyampaikan indikator Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk telah tercapai sebesar95 % dari jumlah penduduk wajib KTP hampir mendekati target RPJMD sebesar 100%. Sementara indicator kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk mencapai 83 % dari target RPJMD sebesar 100%.

m. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Anggaran yang dioalokasikan untuk mendukung urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2017 sebesar Rp.13.759.481.000,- dengan realisasi keuangan Rp.13.124.120.757,- atau terserap sebesar 95,38% yang dilaksanakan melalui11 program dan 72 kegiatan. RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 menetapkan indikator kinerja pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi jumlah posyandu aktif dan persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.Pencapaian indikator kinerja bidang

i. Pangan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang Pangan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 513.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 503.713.900,- atau terserap sebesar 98,1% yang dilaksanakan melalui 1 program dan 9 kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 pada urusan pangan adalah skor PPH dan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita. Dokumen LKPJ tahun 2017 belum melaporkan capaian kinerja RPJMD untuk urusan pangan tersebut tetapi hanya menyajikan capaian SPM urusan pangan.

j. Pertanian

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang pertanian di Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 44.415.500 atau hanya terserap sebesar 88,83%. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 pada urusan pertanian adalah persentase luas tanah yang bersertifikat. LKPJ tahun 2017 melaporkan capaian jumlah total luas tanah yang disertifikatkan di Kabupaten Rembang mencapai 6.652.606 m³ yang seharusnya dihitung lebih lanjut persentase luasannya.

k. Lingkungan Hidup

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang lingkungan hidup pada tahun 2017 sebesar Rp. 8.986.244.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 8.689.970.127,- atau terserap sebesar 96,33% yang dilaksanakan melalui 15 program dan 52 kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta indeks kualitas lingkungan

g. Tenaga Kerja

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan tenaga kerja pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.947.500.000 dengan realisasi keuangan Rp.1.883.761.800 atau terserap sebesar 96,72 % yang telah dilaksanakan melalui 3 program dan 23 kegiatan. Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan tenaga kerja adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dokumen LKPJ 2017 belum melaporkan capaian indikator kinerja TPT sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD yang seharusnya pada tahun 2017 mencapai target kinerja sebesar 4,2%.

h. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.871.000.000 dengan realisasi keuangan Rp.2.853.790.995 atau terserap sebesar 99,40 % yang diimplementasikan melalui 7 program dan 35 kegiatan. RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 telah menetapkan indikator kinerja pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi rasio KDRT, Cakupan desa ramah anak, Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintahan, dan cakupan pemenuhan hak anak. LKPJ tahun 2017 melaporkan tingkat capaian kinerja dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan yaitu sebanyak 3.781 pegawai wanita yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, namun data ini belum dapat digunakan untuk menilai capaian indikator kinerja RPJMD.

follow program", semakin besar prioritas satu program didalam mencapai perwujudan visi misi Kabupaten di sebuah OPD maka semakin besar pula alokasi anggaran yang harus diberikan kepada OPD tersebut.

- c. Lemahnya akurasi data di setiap OPD serta ketidaksinkronan antar bidang didalam OPD dan antar OPD dengan OPD lainnya, salah satunya mencerminkan lemahnya SDM OPD dalam melaksanakan tupoksi dalam pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan OPD yang hampir terjadi di seluruh OPD yang ada disamping persoalan kurangnya koordinasi lintas OPD maupun secara internal OPD. Untuk itu kedepan DPRD merekomendasikan kepada Bupati agar lebih mengedepankan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM sesuai dengan amanah undang-undang ASN serta meningkatkan intensitas koordinasi antar OPD maupun internal OPD.
- d. Untuk mendukung Visi dan misi Kabupaten Rembang RPJMD secara khusus pada sektor pariwisata dan pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh anggaran secara maksimal. Dalam rangka meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Rembang melakukan inovasi dan kreatifitas dalam menggali destinasi-destinasi baru di sektor pariwisata tidak hanya fokus pada obyek-obyek wisata yang selama ini sudah ada dan sudah dikelola oleh masyarakat. Terkait dengan program pemberdayaan masyarakat agar pemerintah daerah tidak hanya fokus dalam pembangunan ifrastruktur saja, pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui pelatihan-pelatihan sehingga dapat bersaing dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini.

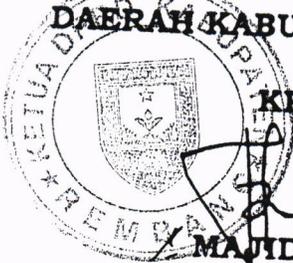
- e. Dalam meningkatkan PAD pada sektor Pariwisata di Kabupaten Rembang agar Pemerintah Daerah mendukung secara penuh, baik kebijakan maupun anggaran, sehingga sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dalam menyumbang PAD. Sedangkan peningkatan PAD dari sektor perikanan, perlu digalakkan kegiatan penegakan peraturan daerah tentang penjualan ikan di luar TPI.
4. Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2017 mendapat tugas pembantuan dari 3 kementerian yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian untuk dua kegiatan dengan anggaran, dan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Secara *output* seluruh kegiatan tersebut telah terlaksana, namun secara *outcome* kegiatan tersebut belum mendatangkan manfaat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu DPRD merekomendasikan bahwa dalam penempatan dan pemanfaatan tugas pembantuan kedepan agar melaporkan *output* maupun *outcome* secara kuantitatif dan terukur serta lebih terarah dan terfokus kepada kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Rembang.
5. Pada tahun 2017, Kabupaten Rembang melaksanakan 7 kerja sama antar daerah yang dibuat yang pelaksanaannya oleh diampu oleh 9 OPD Kabupaten Rembang dan 16 kerja sama dengan pihak ketiga, sementara kordinasi dengan instansi vertikal daerah telah melibatkan 12 instansi vertical. Pada laporan yang tertuang dalam buku LKPJ, OPD yang melakukan kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga serta koordinasi instansi vertikal yang dimaksud belum menggambarkan *output* dan *outcome* dari kerja sama itu sendiri. Untuk itu kedepan DPRD merekomendasikan agar kerjasama antar daerah, lembaga-lembaga yang memiliki peran percepatan pembangunan, serta koordinasi dengan instansi vertikal baik tingkat pusat maupun

daerah harus lebih ditingkatkan dan secara berkala perlu dilaporkan perkembangannya.

6. DPRD Kabupaten Rembang menerima LKPJ Bupati Tahun 2017 dengan merekomendasikan agar dokumen LKPJ kedepan dibuat lebih lengkap, sempurna dan memenuhi ketentuan persyaratan yang dibutuhkan sehingga dalam pembahasan DPRD mudah dipahami.

Demikianlah rekomendasi DPRD terhadap LKPJBupatiRembang tahun2017 ini kami sampaikan, sebagai media evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah agar ke depan menjadi lebih baik.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG**



KETUA,



MAJID KAMIL, MZ

